

**PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN
PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI
BARAT KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Oleh

ALI RAJA NASUTION

NIM 10621003665

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA RIAU
2011

ABSTRAK

Penetapan mahar dalam adat Mandailing Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan seperti : tertundannya pelaksanaan akad nikah, pembatalan pernikahan, terjadinya nikah sirri, dan lain sebagainya. Maka, untuk mengetahui tata cara penetapan mahar dalam adat Mandailing dan dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan di Desa Tambusai Barat penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara penetapan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat, untuk mengetahui dampak positif dan negatif penetapan mahar tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan mahar pada adat masyarakat Mandailing di Desa tersebut. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sbb :

1. *Angket*, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
2. *Wawancara*, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.
3. *Observasi*, yaitu mengamati baik secara langsung dan maupun tidak langsung mengenai kegiatan penetapan mahar

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi data kuantitatif yang berasal dari angket dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari cara tabulasi (tabel-tabel) kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan. Sedangkan data kualitatif, yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional.

Penetapan mahar tersebut dilaksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon istri yang dihadiri oleh pihak calon istri dan calon suami yang dianggap penting. Penetapan mahar di Desa Tambusai Barat adalah bahagian dari '*urfun shohih*. Allah SWT memerintahkan untuk selalu melaksanakannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam al Quran surah al A'raf : 199." *Jadilah engkau*

pema'af dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf (al 'urf) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Penetapan mahar tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan karena besarnya kadar mahar yang di tentukan.

Dalam penetapan mahar tersebut terdapat dua kumudharatan yaitu, *Pertama* dengan tingginya kadar mahar yang diminta pihak calon istri kebanyakan dari pihak laki-kaki merasa keberatan. *Kedua* bila kadar mahar itu rendah maka di khawatirkan akan meraja lelaya perceraian. Ulama fiqh menjelaskan bahwa apabila ada satu perbuatan yang mempunyai dua mudharat maka boleh dikerjakan yang lebih sedikit mudharatnya. Dengan qaidah sebagai berikut :
Artinya:”*Diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudharat”.*

Dengan demikian penetapan mahar di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : PROFIL DESA TAMBUSAI BARAT	
A. Kondisi Geografis dan Demografi	15
B. Kondisi Pendidikan	19
C. Kondisi Kehidupan Beragama	22
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	25
E. Kondisi Adat Istiadat.....	27
BAB III : MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT MANDAILING	
A. Mahar Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar dan Syarat Mahar	29

2. Macam-macam Mahar, Ketentuan Mahar	
Dalam Islam dan Penetapan Mahar Dalam	
Islam.....	36
3. Pendapat Ulama Tentang Mahar	43
B. Adat Mandailing.....	46
1. Adat dan Pengertiannya	46
2. Mandailing dan Asal Usulnya.....	47
3. Sekilas Tentang Adat Mandailing.....	51
BAB IV : PENETAPAN MAHAR MENURUT ADAT	
MANDAILNG DAN HUKUM ISLAM	
A. Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Mahar	54
B. Dampak Negatif dan Positif Penetapan Mahar Terhadap	
Kelangsungan Pernikahan	77
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar....	78
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa¹.

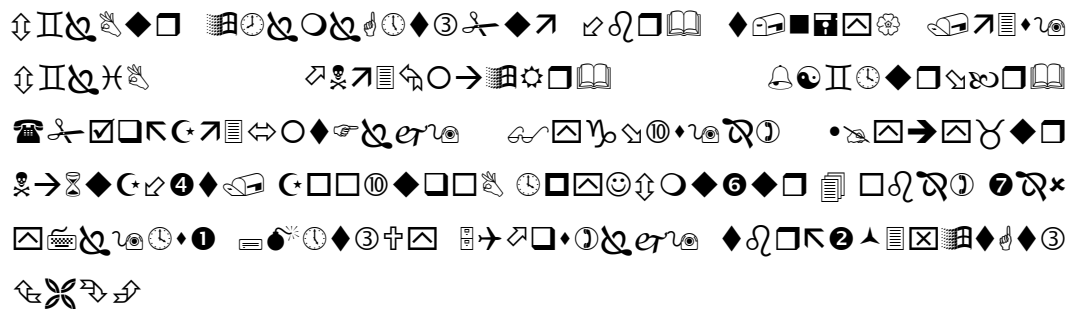
Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (*'aqad*)² yang mengandung unsur pengesahan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahramnya*. Transaksi tersebut memuat unsur-unsur *yuridis* yang memberi *legitimasi* kepada seorang pria untuk menjaga, menuntun dan memelihara kesejahteraan wanita dan anak-anaknya secara sah dan bertanggung jawab³.

Perkawinan juga merupakan manifestasi kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum : 21.

¹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. ke-3, h. 3.

² Aqad adalah perikatan, perjanjian, pernikahan. Yakni suatu bentuk perikatan, perjanjian dan pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pertalian ijab dan qabul menurut bentuk yang ditetapkan syari'at, berpengaruh pada objek yang dijanjikan. Kutipan Dodi Muhammad Jabbar, dkk Penelitian kelompok, *Tradisi Pemberian Gawan Bagi Masyarakat Jawa di Kelurahan Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Dalam Acara Walimatul 'Ursy Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru, 2009) hal.1

³ *Ibid*



Artinya : ” Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”⁴.

Dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan rahmat-Nya dengan perkawinan agar manusia dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara baik dan benar dalam rangka pengabdian diri kepadaNya. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan di antara pihak suami dan pihak istri⁵.

Islam menganjurkan bahwa apabila suatu perkawinan dianggap sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan memenuhi unsur syarat dan rukun pernikahan⁶, yaitu :

a. Rukun Nikah

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), Cet. ke-4, h. 644.

⁵ Dodi Muammar Jabbar, *Op.cit.* h.2

⁶ Jumni Nelli, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 17.

3. Adanya dua orang saksi
 4. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul
- b. Syarat Nikah⁷
1. Syarat bagi laki-laki.
 - 1.1. Tidak di paksa.
 - 1.2. Tidak dalam ihram haji atau umrah.
 - 1.3. Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam).
 2. Syarat bagi perempuan.
 - 2.1. Bukan perempuan yang dalam 'iddah.
 - 2.2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
 - 2.3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim.
 - 2.4. Tidak dalam keadaan ihram haji dan 'umrah.
 - 2.5. Bukan perempuan musyrik.

Berbeda halnya dengan Ulama Hanafiyah, menurutnya rukun nikah itu hanyalah ijab dan qabul saja. Ijab dan qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengingat diri dalam suatu perkawinan⁸.

Dalam pelaksanaan perkawinan Islam mahar merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Maskawin disebut juga dengan *mahar*, *nihlah* dan *faridah*. Menurut istilah syara' maskawin artinya

⁷ Mohd. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, th), h. 455-456.

⁸ Jumni Nelli, *loc,cit*

suatu yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu apa yang diterima darinya⁹.

Maskawin atau mahar adalah merupakan hak calon istri, banyak sedikitnya maskawin atau mahar tersebut tergantung pada kehendak atau kemauan calon istri itu sendiri, apabila dimaafkan saja oleh sang calon istri maka hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya. Maskawin atau mahar tersebut boleh dimanfa'atkan oleh suami selama itu atas izin istri¹⁰.

Prof. Abdul Rahman I. Doi, Ph. D menjelaskan ” Dia (Istri) memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya maskawin itu kepada suaminya atau walinya”¹¹. Dalam hal ini tentu saja si wanita berhak untuk membebaskan suaminya dari kewajiban maskawin atau mengurangi jumlahnya setelah terbinanya saling pengertian di antara mereka¹².

Muhammad Nasib ar-Rifa'i menjelaskan ” Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya. Jika istri berbaik hati dengan memberikan mahar atau memberikan sebahagiannya, setelah mahar itu disebutkan

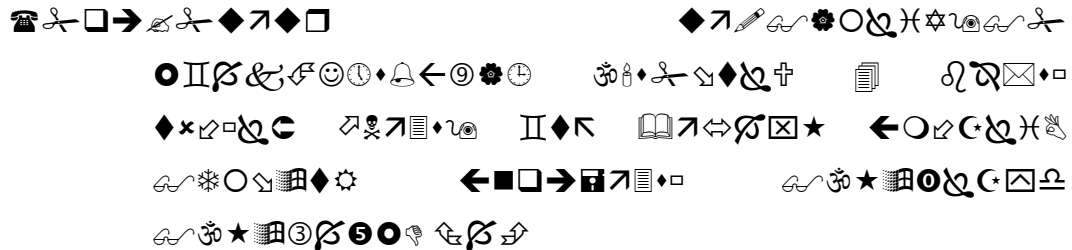
⁹ Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqih Mdzhab Syafi'i* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), ed.2, Cet. ke-1, Jilid 2, h.277

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdul Rahman I. Doi, Ph. D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), Cet ke- 2. h. 70.

¹² *Ibid*, h.72

kuantitasnya, maka suami dapat memakannya sebagai makanan yang halal dan baik ”¹³. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ : 4.



Artinya : ” Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu(rela hatinya) tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula ”.

Adapun ketetapan dari Rasulullah mengenai mahar adalah termaktub dalam kitab Shohih Bukhari dan Shohih Muslim yang berbunyi :

Artinya : ” Bahwa Nabi SAW melihat pada diri Abdurrahman bin 'Auf bekas warna kuning, lalu Nabi bertanya, apa ini ? ia menjawab aku mengawini seorang wanita dengan maskawin satu biji Emas, ‘ lalu Nabi SAW bersabda mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu¹⁴.

¹³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), Cet ke-1, Jilid 1, h. 651.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, h. 472-473.

Desa Tambusai Barat adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang luasnya 9.650 ha², dengan jumlah penduduk 1.019 KK, 4.685 jiwa (Laki – laki 2.434 jiwa dan Perempuan 2.251 jiwa), jumlah sarana pendidikan adalah PAUD 3 buah, TK 1 buah, MDA 3 buah, SD 2 buah, dan SMP 1 buah, yang didiami oleh orang yang beragama Islam (838 KK 4.138 jiwa) dan orang yang beagama Kristen (181 KK 547 jiwa)¹⁵ dan berbagai macam suku, salah satunya etnis Mandailing. Etnis suku Mandailing di Desa Tambusai Barat dalam setiap kegiatan adat sangat kental dengan nuansa kekerabatan, atau sering juga dikatakan dengan istilah ”*Dalihan Natolu*” baik kegiatan kelompok maupun kegiatan kemasyarakatan, seperti acara kenduri, khitanan (sunatan), pesta perkawinan, gotong royong dan lain sebagainya.

Desa Tambusai Barat yang mayoritas penduduknya adalah bersuku Mandailing. Dalam penentuan (penetapan) mahar selalu orang tua dan kaum kirabat perempuan untuk mengambil keputusan. Sering di jumpai dalam adat Mandailing bahwa mahar adalah sangat besar (mahal). Sehingga dengan besarnya mahar tersebut kebanyakan dari pihak lelaki merasa terpaksa untuk menerima ketentuan mahar yang ditetapkan oleh pihak (keluarga) calon istri tersebut. Walaupun demikian bukan semua dari pihak laki-laki merasa keberatan dengan hal yang demikian. Hal ini terungkap ketika wawancara penulis pada tanggal 1-5 April 2010. ” *Riswan* ” yang menikah dengan ” *Jerniati* ”, di tanya kepada beliau tentang bagaimana ketentuan mahar yang dibebankan kepada

¹⁵ Monografi Desa Tambusai Barat April 2010

beliau, ia mengatakan biasa-biasa saja. Karena bagi saya mahar yang dibebankan hanya Rp 15.000.000¹⁶. Akan tetapi berbeda dengan ” *Jupen Siregar* ” yang melaksanakan pernikahan dengan ” *Rasmi Hasibuan* ” pada tahun 2009 yang lalu. Ketika di tanya ia mengatakan, saya sebenarnya sangat keberatan dengan ketentuan mahar yang ditentukan pihak istri saya, karena mahar yang dibebankan kepadaku Rp 10.500.000. Sebelum kami menikah, istri saya telah setuju dengan maharnya Rp 3.000.000. Setelah sampai detik-detik pernikahan, maka pihak keluarga istri tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Sehingga, karena kami saling mencitai dengan rasa terpaksa saya hutang kesana kemari. Sehingga terkumpul Rp 3.500.000. Itulah yang saya berikan pada saat akad nikah. Kekurangannya hutang dulu, sampai hari ini belum saya bayar¹⁷.

Contoh lain ” *Abdul Ghofur* ” menikah dengan ” *Asmidar* ” pada tahun 2008 yang lalu, ketika di tentang hal ini, beliau menjawab : saya sangat keberatan dengan mahar yang ditetapkan oleh pihak istri saya, karena bagi saya mahar terlalu berat. Pertama kali pihak istri menetapkan Rp 20.000.000. lalu, pihak keluarga saya meminta Rp 8.000.000, karena hanya itulah kemampuan keluarga saya. Sehingga pernikahan saya di tunda hingga 4 hari, kemudian musyawarah lagi, pada musyawarah kedua, pihak istri menetapkan Rp 18.000.000. Dengan ketetapan itupun pihak kami tidak mampu, maka solusi terakhir kami lari dan kami menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali istri satupun tak ada

¹⁶ Riswan (Anggota Masyarakat) Wawancara, Desa Tambusai Barat, 2 April 2010

¹⁷ Jupen Siregar (Anggota Masyarakat), Wawancara, Desa Tambusai Barat , 5 April 2010 .

yang mau menikahkan kami. Karena peristiwa itu sampai sekarang kami dianggap oleh pihak istri bukan bagian dari keluarga mereka¹⁸.

Contoh lain ” *Abdul Halim* ” yang rencananya menikahi ” *Siti Zubaidah* ” pada bulan Januari yang lalu. Ketika di tanya, beliau mengatakan, dalam perundingan mahar tidak sesuai dengan kesanggupan kami, maka terpaksa pernikahan yang saya rencanakan di batalkan. Karena pertama kali kami berunding pihak calon istri menetapkan mahar : Tanah seluas 1 ha ditambah uang sebesar Rp 5.000.000. Karena keluarga kami tidak sanggup, maka meminta dikurangi, lalu dikurang menjadi tanah 1 ha ditambah uang Rp 3.000.000. tapi hal inipun rasanya kami tidak mempunyai kemampuan, kami memintak jangan pakai tanah akan tetapi uang saja Rp 7.500.000. Karena kami orang miskin, akhirnya pihak keluarga saya mohon izin untuk ditunda musyawarahnya. Setelah dua hari kemudian, musyawarah dilanjutkan lagi. Tetapi tidak ada perubahan, padahal kami sudah menambah dari sebelumnya. menjadi Rp 8.500.000. Namun, pihak istri masih tetap dengan kesepakatan mereka. Maka pihak kami mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan¹⁹.

Hal inilah yang merupakan fenomena yang terjadi saat ini di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Apabila kaum kirabat tidak setuju dengan apa yang disampaikan calon istri tentang mahar, maka sering terjadi seorang perempuan yang mau menikah

¹⁸ Abdul Ghofur (Anggota Masyarakat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat, 4 April 2010.

¹⁹ Abdul Halim (Anggota Masyarakat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat, 4 April 2010

tersebut terhambat pernikahannya beberapa hari dan sampai satu minggu, bahkan ada yang dibatalkan pernikahannya, dan ada pula yang lari lalu menikah dengan wali hakim. Yang lebih ironisnya lagi kalau kaum kirabat tidak diikuti sertakan dalam hal ini seorang anak perempuan yang menikah itu tidak mereka anggap sebagai family atau kaum kirabat mereka, hal seperti ini sering di jumpai pada saat *walimatul 'ursy*, hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Hal inilah yang menjadi permasalahan. Oleh sebab itu penulis ingin menggali dan mengetahui tentang musyawarah penetapan mahar lebih dalam lagi dengan membuat satu penelitian yang di beri judul ” *PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KEC. TAMBUSAI KAB. ROKAN HULU)* ”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini tentang penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tahun 2008 sampai tahun 2010, dampak negatif, dampak positif bagi masyarakat suku Mandailing, dan tinjauan hukum Islam terhadap masalah ini.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penetapan mahar pada adat masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa dampak positif dan negatif penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penetapan mahar pada adat masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sbb :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penetapan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penetapan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sbb :

- a. Sebagai konstribusi pemikiran tentang masalah penetapan mahar dan dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai.
- b. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang penulis laksanakan di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut karena penetapan mahar sebagaimana penulis sebutkan di atas sudah membudaya dalam masyarakat di Desa Tambusai Barat, dan lokasi penelitian tersebut mudah untuk penulis jangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan pernikahan mulai tahun 2008-2010, tokoh masyarakat, Ulama dan

tokoh adat di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Objek penelitian ini adalah penetapan mahar, dampak penentuan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Tambusai Barat yang terlibat dalam kasus yang diteliti. Karena populasinya terlalu banyak, maka penulis menetapkan sample sebanyak 30 orang dari kalangan masyarakat dan 5 pasang suami istri, 5 tokoh adat dan 5 tokoh agama.

4. Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diambil dari masyarakat yang melakukan pernikahan di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tahun 2008-2010, tokoh adat dan tokoh agama.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. *Angket*, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. *Wawancara*, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.
- c. *Observasi*, yaitu mengamati baik secara langsung dan maupun tidak langsung mengenai kegiatan penetapan mahar pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi data kuantitatif yang berasal dari angket dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari cara tabulasi (tabel-tabel) kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan. Sedangkan data kualitatif, yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional. Metode analisa dengan menggunakan data tersebut menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

7. Metode Penulisan

- a. *Deskriptif*, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. *Deduktif*, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

- c. *Induktif*, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Profil Desa Tambusai Barat, yang terdiri dari Kondisi Geografis Dan Demografi, Kondisi Pendidikan, Kondisi Kehidupan Beragama, Kondisi Sosial Ekonomi dan Kondisi Adat Istiadat.

BAB III Mahar Dalam Hukum Islam dan Adat Mandailing, yang terdiri dari Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat Mahar, Macam-macam Mahar, Ketentuan Mahar, Penetapan Mahar, Pendapat Ulama Tentang Mahar, Adat Mandailing dan Pengertiannya, Mandailing dan Asal Usulnya dan Sekilas tentang adat Mandailing.

BAB IV Penetapan Mahar Menurut Adat Mandailing dan Hukum Islam, yang terdiri dari Tata cara pelaksanaan penetapan mahar menurut adat Mandailing, dampak positif dan negatif penetapan mahar terhadap

kelangsungan pernikahan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penetetapan mahar.

BAB V Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

PROFIL DESA TAMBUSAI BARAT

A. Kondisi Geografis dan Demografi

Desa Tambusai Barat adalah salah satu Desa diantara beberapa Desa yang terletak di Kecamatan Tambusai \pm 8 km dari pusat kecamatan, \pm 38 km dari pusat Kabupaten dan \pm 225 km dari Ibu kota Propinsi. Merupakan Desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 9.650 Ha², dengan jumlah penduduk 1.019 KK dan 4.685 jiwa¹.

Menurut data di Kantor Kepala Desa Tambusai Barat yang luas wilayahnya 9.650 Ha dengan jumlah penduduk 4.685 jiwa batas-batas wilayah Desa Tambusai adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Kumango
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Balung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Aur

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Desa Tambusai Barat, wilayah dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun, 6 (enam) RW, dan 12 (dua belas) RT yang

¹ Monografi Desa Tambusai Barat April 2010

tersebar di seluruh wilayah Desa Tambusai Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah².

Desa Tambusai Barat yang sebagian masyarakat menyadari arti penting pembangunan, maka kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan kebiasaan, baik yang bertani, berdagang dan sebagainya, dan untuk pemasaran hasil pertanian, produksi serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua telah disalurkan dan tersedia di Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten yang letaknya tidak begitu jauh dan dapat dijangkau oleh transportasi darat, dimana pada pasar umum dan pertokoan yang semakin hari pembangunannya semakin maju dan mantap.

Sebagian besar penduduk Desa Tambusai Barat adalah masyarakat yang bersuku Mandailing, sebagai penduduk asli. Zaman sekarang penduduk Desa Tambusai Barat sudah mulai berpikir lebih maju dari sebelumnya, dan banyak mengecap pendidikan walaupun hanya di tingkat SLTP.

Jumlah penduduk yang bermukim di daerah ini yang jumlahnya 4.685 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.434 jiwa, dan perempuan 2.251 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

² Monografi Desa Tambusai Barat April 2010

Tabel I
Klasifikasi Penduduk Desa Tambusai Barat
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	2.434	51,96 %
2.	Perempuan	2.251	48,04 %
	Jumlah	4.685	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat Tahun 2010

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu laki-laki 2.432 atau 51,96 % dan jumlah perempuan 2.251 atau 48,04 % dari jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Tambusai Barat.

Sedangkan menurut umur, penduduk Desa Tambusai Barat sampai tahun 2010 lebih banyak yang berusia 0-7 tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II
Klasifikasi Penduduk Desa Tambusai Barat
Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-7	1.552	33,12 %
2	8-13	1.266	27,02 %
3	14-20	603	12,87 %
4	21-30	302	6,44 %
5	31-50	860	18,35 %
6	51 keatas	103	2,20 %
	Jumlah	4.685	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 0-7 tahun sebanyak 1.552 orang atau 33,12 %, 8-13 tahun sebanyak 1.266 orang atau 27,02 %, 14-20 tahun sebanyak 603 orang atau 12,87 %, 21-30 tahun sebanyak 302 orang atau 6,44 %, 31-50 tahun sebanyak 860 orang atau 18,35 %, dan 51 tahun keatas 103 orang atau 2,20 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Tambusai Barat mayoritas berusia 0-7 tahun, dan yang paling sedikit adalah penduduk berusia 51 tahun keatas.

B. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu Bangsa dan Negara dapat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di Bangsa ataupun Negara itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut, telah di bangun sarana dan prasarana di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai berbagai lembaga pendidikan berupa 3 (tiga) unit gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 (satu) unit gedung Taman Kanak-kanak (TK), 2 (dua) unit gedung Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) unit gedung Pendidikan Diniyah Takmiliyah (PDTA) dan 1 (satu) unit gedung Sekolah menengah Pertama (SMP). Sedangkan untuk SLTA masyarakat Desa Tambusai Barat melanjutkan ke Ibu kota Kecamatan, Kabupaten dan wilayah lain yang mereka sukai. Adapun untuk Perguruan Tinggi mereka lebih dominan memilih ke Universitas Pasir Pengarayan di Pasir Pengarayan, Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau di Pekanbaru, Universitas Islam Riau (UIR) di Pekanbaru dan Instut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara di Medan.

Taraf pendidikan Desa Tambusai Barat masih relative rendah, hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-ratanya hanya ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

menuntut ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III
Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Tambusai Barat
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum sekolah	1.452	30,99 %
2.	Tidak tamat SD	241	5,14 %
3.	Tamat SD	855	18,25 %
4.	Tamat SLTP/ sederajat	1.580	33,73 %
5.	Tamat SLTA/ sederajat	545	11,64 %
6.	Tamat Akademik (DI-D3)	2	0,04 %
7.	Sarjana	10	0,21 %
	Jumlah	4.685	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010

Jika dilihat dari tabel diatas maka pendidikan masyarakat Desa Tambusai Barat 1.580 jiwa hanya berpendidikan SMP. Adapun masyarakat yang belum sekolah mencapai 1.452 jiwa, termasuk balita yang mayoritas dalam kelompok tersebut. Sementara masyarakat yang berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, SLTA dan perguruan tinggi hanya sebagian kecil saja, yaitu SD berjumlah 855 jiwa, SLTA berjumlah 545 jiwa dan perguruan tinggi serta akademik berjumlah 12 jiwa, dan ada yang lebih ironinya yang sama sekali tidak tamat SD

yaitu 241 jiwa. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Desa Tambusai Barat telah mempunyai pendidikan walaupun mayoritasnya tamatan SLTP.

Adapun prasarana sebagai penunjang pendidikan di Desa Tambusai Barat telah penulis sebutkan di atas, tetapi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Klasifikasi Sarana Pendidikan
Di Desa Tambusai

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3 Unit
2	TK	1 Unit
3	SD	2 Unit
4	PDTA	2 Unit
5	SMP	1 Unit
	Jumlah	9 Unit

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010

Dilihat dari tabel diatas bahwa prasarana untuk menunjang pendidikan nampaknya sudah hampir memadai, namun, karena kurang pola pikir masyarakat Desa Tambusai Barat akan pentingnya pendidikan, maka mayoritas masyarakat hanya berpendidikan SLTP.

C. Kondisi Kehidupan Beragama

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting, dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Dalam masyarakat Desa Tambusai Barat penduduknya hampir 85 % menganut agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga masyarakat Desa Tambusai Barat dengan hidup beragama mereka menjadi rukun dan patuh dengan ketentuan-ketentuan agama, walau disamping itu ada agama selain agama Islam, namun mereka hidup saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya.

Umat Islam yang hidup di Desa Tambusai Barat sangat menghargai, menghormati hak-hak agama lain dan saling bantu-membantu dalam masalah sosial.

Adapun sarana untuk menunjang peribadatan Desa Tambusai Barat cukup memadai, hal ini terbukti dengan adanya bangunan-bangunan rumah ibadah, seperti Masjid dan tempat ibadah lainnya, yang di pergunakan untuk tempat ibadah, disamping itu dipergunakan juga sebagai tempat bermusyawarah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel V
Klasifikasi Tempat Peribadatan
Desa Tambusai Barat

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3 Unit
2	Mushala	3 Unit
3	Gereja	5 Unit
4	Wihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	11 Unit

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010

Dari tabel diatas, keberadaan Masjid dan Mushalla di Desa Tambusai Barat cukup memadai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas beragama. Masyarakat juga merasa satu sama lainnya ada keterikatan, sehingga apabila ada sesuatu masalah dapat dimusyawarahkan bersama-sama, selain Masjid dan Mushalla sebagai wadah berkumpulnya jamaah, juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan, seperti:

- a. Pendidikan anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur'an
- b. Tempat belajar seni Al-Qur'an dan Al-Barzanji
- c. Mengadakan wirid yasin bagi kaum Ibu dan kaum Bapak

d. Majelis taklim/pengajian masalah agama.

Kalau dilihat dari segi keyakinan (agama), maka Islam adalah agama mayoritas. Disamping itu ada agama-agama yang lain, seperti : Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI
Klafikasi Jumlah Pemeluk Agama
Desa Tambusai Barat

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	3.970	84,75 %
2	Katolik	460	9,81 %
3	Protestan	255	5,44 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Kongucu	-	-
	Jumlah	4.685	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010

Dari tabel diatas nampaknya bahwa masyarakat Desa Tambusai Barat mayoritas memeluk agama Islam, yaitu 3.970 jiwa atau 84,75 %. Disamping itu ada agama lain yang hidup berdampingan bersama mereka. Walaupun jumlahnya sedikit (minoritas) namun hak-hak mereka dalam masyarakat tetap sama. Agama

Kristen Katolik menempati urutan kedua setelah agama Islam, dengan jumlah pengikut 460 jiwa atau 9,81 % dan agama Kristen Protestan berjumlah 255 jiwa atau 5,44 %. Sedangkan agama Hindu, Budha dan Kongucu tidak ada.

D. Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber Ekonomi masyarakat Desa Tambusai Barat adalah bertani. Namun, ada juga yang berdagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VII
Klafikasi Mata Pencaharian Masyarakat
Desa Tambusai Barat

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	102 Orang	2,17 %
2	Buruh	280 Orang	5,84 %
3	PNS	25 Orang	0,53 %
4	Guru	62 Orang	1,22 %
5	Petani	1.385 Orang	29,45 %
6	TNI	2 Orang	0,04 %
7	Belum Bekerja	2.856 Orang	60,75 %
	Jumlah	4.685 Orang	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Tambusai Barat tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Tambusai Barat belum bekerja dan mayoritas mata pencaharian mereka adalah bertani. Disamping itu mata pencaharian yang lain sebagai tambahan hasil utama usaha mereka.

Bertani adalah mata pencaharian yang umum bagi masyarakat Desa Tambusai Barat dengan jumlah 1.385 orang atau 29,45 %, pedagang dengan jumlah 102 orang atau 2,17 %, PNS dengan jumlah 25 orang atau 0,53 %, guru dengan jumlah 62 orang atau 1,22 %, TNI dengan jumlah 2 orang atau 0,04 % dan yang belum bekerja sebanyak 2.856 orang atau 60,70 % termasuk anak-anak.

Melalui pencaharian yang demikian, masyarakat Desa Tambusai Barat telah dapat dikategorikan kepada suatu tingkat kehidupan masyarakat yang baik. Jumlah pengangguran yang di kategorikan di Desa Tambusai Barat tidak ada. Karena pada umumnya masyarakat mempunyai kebun Sawit/Karet untuk di garap.

E. Kondisi Adat Istiadat

Penduduk Desa Tambusai Barat adalah masyarakat yang heterogen, yang mayoritas penduduknya adalah suku Mandailing, sebagai suku asli masyarakat Desa Tambusai Barat. Adapun suku yang lain, seperti : Batak Toba, Jawa, Melayu, Minang dan lain sebagainya adalah pendatang dari berbagai daerah. Seperti : pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Dari tempat asal, mereka membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli tempatan. Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat Desa Tanbusai Barat, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, dalam pelaksanaan pernikahan slalu dilaksanakan sesuai dengan adat asli tempatan (Mandailing).

Adat masyarakat Desa Tambusai Barat terlihat apabila syukuran kelahiran anak, khitanan, resepsi pernikahan. dalam rangka menyambut hari-hari nasional dan hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara-acara kesenian, seperti : rebana dan lain sebagainya.

Untuk acara perkawinan, adat istiadat sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Tambusai Barat, Karena Desa Tambusai Barat dekat dengan perkampungan Melayu (Dalu-dalu). Maka mulai proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi perkawinan, menggunakan adat Mandailing.

BAB III

MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT MANDAILING

A. MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar dan Syarat Mahar

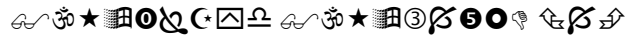
1.1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi adalah *Maskawin*. Secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik berbentuk benda ataupun jasa.(memerdekakan, mengajar, dsb)¹.

Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun, walaupun sangat dekat denganya. Orang lain tidak akan boleh mengambilnya, bahkan suaminya sendiripun tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Akan tetapi bila dibolehkan istrinya tidak ada halangan baginya untuk memakainya. Hal ini di jelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa : 4.



¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta : Kencana, 2006), ed. 1, cet. Ke-1, h. 84.



³ *Ibid.*

bukti adanya ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu rumah tangga⁴.

Iman Syafi'i juga mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya⁵. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah an-Nisa: 20.



Artinya :” Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil dengan tuduhan yang dusta dan dengan(menanggung) dosa yang nyata ”.

1.2. Dasar Hukum Mahar

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Semarang : Effhar Offset, th), h.121.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h.85

Syaikhul Islam *Rahimahullahu* berkata: ”Termasuk Sunnah, meringankan maskawin dan maskawin itu supaya tidak melebihi maskawin istri-istri Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* dan putri-putrinya”⁶.

Dalam Hadits lain Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

خير الصداق ايسره

Artinya : ”Maskawin yang paling baik adalah yang mudah”⁷.

Dalam Hadits lain Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

الزنا نساء الرجال ولا تغلوا في المهور

Artinya : ”Padukanlah wanita-wanita itu pada para lelaki, dan janganlah berlebihan dalam maskawin”⁸.

Diriwayatkan dari Tirmizi dalam sebuah Hadits Shahih, ia berkata: Umar Ibn Khattab pernah berkhotbah di hadapan orang banyak yang isinya: ”Ketahuilah! Janganlah kamu berlebihan dalam memberikan maskawin kepada wanita-wanita, karena walaupun maskawin itu adalah sebagai penghormatan di dunia atau sebagai ketaqwaan disisi Allah SWT,

⁶ Imam al' Alamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Penerjemah Rusnan Yahya, *Hukum-hukum Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), Cet. Ke-1, h.97.

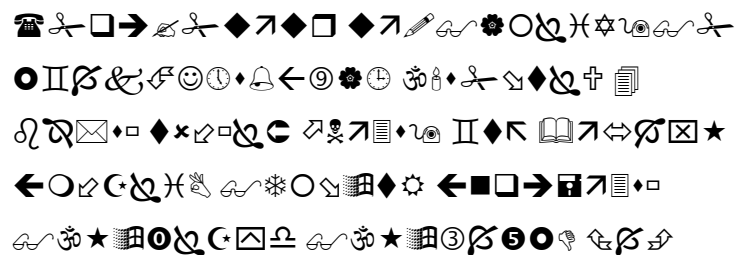
⁷ Ibnu Hajar Al'asqolani, *Bulughul Marom min adallatil Ahkam*, (Jeddah : Alharomaini Liththoba'ati Wannasyari Watta'uzi'i, tt), h. 225.

⁸ *Ibid*, h.98

maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam*, beliau tidak pernah memberikan maskawin kepada istri-istrinya, dan di antara putri-putrinya tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas Uqiyyah”⁹.

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memberi maskawin kepada istri-istrinya suatu maskawin yang pembayarannya menyusahkannya, atau sulit untuk dilunasi jika itu berupa pinjaman¹⁰.

Al quran menjelaskan tentang maskawin pada surah an-Nisa’ : 4.



Artinya : ”Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu (rela hatinya) tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula ”¹¹.

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syahid Sayyid Quthb, Penerjemah : As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hasan, *Tafsir Fi Zhilalil Qur an*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.Ke- 1, h.125.

yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah, dimana hak itu di rampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin itu di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya¹².

Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin sebagai ” *Nihlah* ” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian. Apabila kemudian si istri merelakan maskawinnya itu sebahagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka si istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istri dengan senang hati. Karena hubungan antara suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak¹³.

Dengan memperlakukan sistem seperti ini, Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliyah mengenai wanita dan maskawinnya, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukannya. Di

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h.126

berikan keleluasaan, saling merelakan dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersama dan untuk menyegarkan suasana kehidupannya¹⁴.

1.3. Syarat Mahar

Dalam Islam tentu sudah ada aturan main yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri baik permasalahan ibadah, jinayah, siyasah, munakahat dan lain sebagainya.

Dalam Fiqh munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya mahar yang diberikan kepada calon istri, adapun syarat tersebut sebagai berikut :

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga/suci.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* tidak sah.

¹⁴ *Ibid.*

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya¹⁵.

2. Macam - macam Mahar, Ketentuan Mahar Dalam Islam dan Penetapan Mahar dalam Islam

2.1. Macam-macam Mahar

Adapun mahar itu terbagi kepada 2 macam yaitu :

1. Mahar *musamma*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat¹⁶.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, MA dalam bukunya mendefinisikan bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah¹⁷.

Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- a. Telah bercampur (Bersenggama)
- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian ijma' Ulama.

¹⁵ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Ed.1,Cet .Ke- 1, h. 39-40.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentara, 2001), Cet. Ke-7, h. 364.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *loc.cit*.

2. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya¹⁸.

Mahar *mitsil* ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur (bersenggama).
2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah¹⁹.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur Ulama di bolehkan.

Firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah : 236.



¹⁸ *Ibid.*, h.94

¹⁹ *Ibid.*

Artinya : ”Tidak ada ataupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya”²⁰.

2.2. Ketentuan Mahar dalam Islam

Mengenai kadar mahar Ulama mazhab telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi. Ulama mazhab mengambil dalil firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 20.

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِكْرَاهٌ أَنْ يُعْطُوا مَهْرًا وَلَا كُنْفَرًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطُوا مَهْرًا كَثِيرًا وَلَا قَلِيلًا وَلَا يَكُنْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ قَوْلًا يُعْطُوا أَوْ لَا يُعْطُوا ذَلِكَ هُوَ الْفُسْخُوحُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ عَلَيْهِمْ عَظَمٌ أَلَّا يُعْطُوا ذَلِكَ هُوَ الْفُسْخُوحُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ عَلَيْهِمْ عَظَمٌ أَلَّا يُعْطُوا

Artinya : ” Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil dengan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.

Kemudian Ulama mazhab berbeda pendapat dengan rendahnya mahar tersebut²¹.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc.cit.*

Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Mereka mengambil dalil Hadits Rasulullah SAW.

التمس ولو ختما من حديد

Artinya : "Kawinlah engkau walupun dengan maskawin cincin dari besi.
(HR. al-Bukhari).

Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad yang dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham²².

Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari hal tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi apabila belum bercampur maka suami boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-*fasakh* akad, lalu membayar mahar *musamma*²³.

Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat tentang kadar (ketentuan mahar) dikalangan Ulama madzhab ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rusyd, yaitu²⁴ :

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h.365

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 88.

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu kalau ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita itu selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum Hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya²⁵.

2.3. Penetapan Mahar dalam Islam

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian hukum Islam mengatur hal tersebut dalam '*urf*' (adat istiadat).

Kata '*urf*' secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti :

²⁵ *Ibid.*, h.89

مالفه المجتمع واعتادة وسار عليه في حياته من قول او فعل

” Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”²⁶ .

’Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti di kemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam²⁷ .

1. *al-’Urf al-’Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.
2. *al-’Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat pada masyarakat atau negeri tertentu.

Di samping pembagian di atas, ’urf dibagi pula kepada dua macam²⁸ .

1. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak Benar), yaitu suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

²⁶ Satria Efendi, M, Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) Ed.1, Cet. Ke-2, h. 153.

²⁷ *Ibid.*, h.154

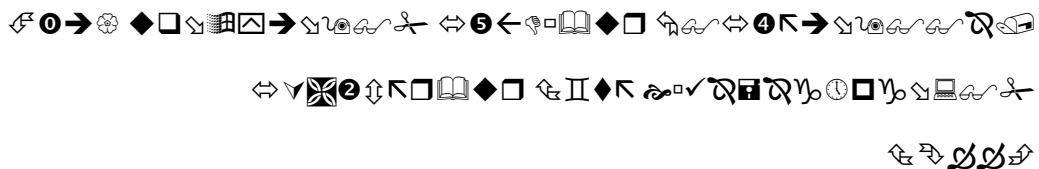
²⁸ *Ibid.*, h.155

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa di jadikan landasan hukum yaitu ²⁹:

1. 'Urf itu harus termasuk 'urf yang *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al Quran dan Sunnah Rasulullah.
2. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. 'Urf itu harus sudah ada ketika sudah terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut.

Allah SWT berfirman di dalam al Quran.

Surah al A'raf : 199³⁰.



Artinya : "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf (*al 'urf*) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Hadits Rasulullah SAW.

²⁹ *Ibid.*, h.156

³⁰ Ja'ih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta : Raja Grafindi Persada, 2002), ed. 1, cet. Ke-1, h. 154.

- a. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda³¹ :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : "Apa yang di pandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah SWT".

- b. Diriwayatkan oleh al Hakim³².

Artinya : "Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula di persulit orang lain. Orang yang mempersulit orang lain akan di persulit oleh Allah dan orang yang memusuhi orang lain akan di musuhi oleh Allah".

Dalam hal ini Ulama fiqh juga mengatakan sbb :

Artinya : "Adat Kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"³³.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya : "Menentukan dengan dasar 'urf seperti menentukan dengan berdasarkan nash"³⁴.

³¹ *Ibid.*, h.155.

³² Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), Cet. Ke-1, h.214.

³³ A. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad* (Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h.209.

³⁴ *Ibid.*, h.213

يرتكب اخف ضررتين

Artinya : ”Diambil mudharat yang lebih ringan di antara dua mudharat”³⁵.

3. Pendapat Ulama Tentang Mahar

a. Macam-macam mahar

Ulama Madzhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) sepakat mengatakan bahwa mahar hanya dibagi kepada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*³⁶.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat³⁷.

2. Mahar *Mitsil* (Sepadan).

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan³⁸.

b. Syarat mahar

³⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-2, h.20.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 364

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *loc.cit.*

Seluruh Ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh berupa uang, perhasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang mempunyai harga. Menurut seluruh mazhab kecuali Malikiyah Disyaratkan bahwa mahar harus di ketahui secara jelas dan ril atau secara global mengenai jumlahnya, maka apabila tidak, maka akad tetap sah tetapi mahar batal. Sedangkan menurut Malikiyah berpendapat akadnya fasid (tidak sah) dan di faskh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Mengena mahar *musamma* yang di berikan berupa barang haram maka Maliki mengatakan apabila belum terjadi percampuran akadnya fasid, tetapi bila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan Ulama yang lain mengatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

Mengenai mahar *musamma* berupa harta rampasan, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kalau prabot itu adalah barang yang dikenal keduanya maka akad dinyatakan fasid dan di fashk sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila sudah terjadi percampuran akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan Ulama Imamiyah dan Hanafiyah mengatakan akad tetap sah, akan halnya mahar, apabila diberikan pada saat itu maka itulah yang menjadi mahar *musammannya* (maharnya sah), maka apabila tidak

diberikan pada saat itu maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama³⁹.

c. Kadar mahar (Ketentuan mahar)

Mengenai kadar mahar penulis sudah terlebih dahulu menyebutkan pada Bab ini yaitu didalam Ketentuan mahar.

B. ADAT MANDAILING

1. Adat dan Pengertiannya

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat yang di anggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian maka tidak hanya yang

³⁹ Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab 2* , (Jakarta : PT. Basrie Press, 1994), Cet .Ke- 1, h. 76-77.

bersangkutan yang mendapat sanksi atau menjadi tercemar tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya⁴⁰. Masyarakat Mandailing sangat dianjurkan *Somba marhula-hula*, artinya harus hormat kepada keluarga laki-laki si istri atau ibu, apabila hal ini dilanggar maka yang melanggar tersebut akan merasa kesulitan mencari nafkah di daerah/wilayah yang di bawah kekuasaan *Hula-hula*⁴¹. Masyarakat yang diwajibkan membayar sanksi adat karena kawin semarga, apabila sanksi tidak dibayar maka bukan saja yang melakukan yang menerima dampaknya, tapi ikut serta keluarganya⁴². Menetapkan mahar secara adat, yang tidak menetapkan mahar secara adat secara tersendiri akan mendapat akibatnya (tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan adat)⁴³.

2. Mandailing dan Asal usulnya

Orang Mandailing diriwayatkan berasal dari Munda yaitu sebuah daerah di India Tengah. Mereka telah berpindah-pindah pada abad-ke 6, karena terpukul dengan serangan bangsa Arayan dari Irak yang meluaskan pengaruh mereka. Setelah melintasi Gunung Himalaya mereka menetap sebentar di Mandalay, yaitu ibu negara Burma purba. Besar kemungkinan nama Mandalay itu sendiri datangnya dari perkataan Mandailing yang mengikuti logat Burma. Sekali lagi

⁴⁰ Z. Pangaduan Lubis, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, di unduh dari <http://definisi-pengertian.blogspot.com>.

⁴¹ Lihat Marwan Dalimunte, *Adat Dalihan Natolu*, di unduh dari <http://sirajasonang.wordpress.com>.

⁴² Abidin Nasution, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 19 September 2010.

⁴³ *Ibid.*

mereka terpaksa berpindah karena pergolakan suku kaum di Burma yang sering berperang.

Pada waktu itu mereka melintasi Selat Malaka , yang pada masa itu bukan merupakan suatu lautan yang besar, sangat dimaklumi bahwa pada masa itu dibagian tertentu Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera hanya di pisahkan oleh selat kecil saja. Kaum Munda telah berjaya menyeberangi laut kecil tersebut dan mendirikan sebuah kerajaan di Batang Pane, Portibi, diduga peristiwa ini terjadi di akhir abad ke – 6. Kerajaan Munda Holing di Portibi ini telah menjadi mashur dan meluaskan wilayah taklukannya hingga kesebahagian besar pantai Sumatera dan Tanah Melayu.

Keadaan ini menimbulkan kemarahan kepada Maharaja Rajenderacola lalu beliau menyerang kerajaan Munda Holing dan negara pantai lainnya di abad ke-9. Tentara kerajaan Munda Holing yang di pimpin oleh Raja Odap-Odap telah ditewaskan oleh Rajenderacola dan berkuasa di seluruh daerah Batang Pane. Tunangannya Boru deak parujar telah melintasi Dolok Maela (sempena Himalaya yang didaki oleh nenek moyangnya) dengan menggenggam segumpal tanah di Portibi untuk menempah satu kerajaan baru (Menempah banua).

Kerajaan kedua di Sumatera di didirikan di Pidoli Dolok di kenali sebagai kerajaan Mandala Holing artinya kawasan orang-orang Keling. Pada masa itu mereka masih beragama Hindu memuja Dewa Siva. Di abad ke 13, Kerajaan Majapahit telah menyerang ke Lamuri, Padang Pariaman dan Mandailing. Sekali lagi kerajaan Mandala Holing ini telah di bumi hangus dan hancur. Penduduk

yang tidak dapat di tawan telah lari ke hutan dan bercampur-gaul dengan penduduk asli. Lalu terbentuklah Marga Pulungan artinya yang di kutip-kutip.

Di abad ke-14 dan ke 15, Marga Pulungan telah mendirikan tiga buah Bagas Godang di atas tiga puncak Bukit namun kerajaan tersebut bukan lagi sebuah kerajaan yang besar, hanya merupakan kerajaan kampung. Di pertengahan abad ke-14, terdapat legenda tiga anak yang dipertuan Pagar Ruyung yang bernama Betara Sinomba, Putri Langgoni dan yang bungsunya Betara Gorga Pinanyungan yang mendirikan dua buah kerajaan baru. Betara Sinomba telah di usir oleh yang dipertuan dari Pagar Ruyung karena kesalahan bermula dengan adiknya Putri Langgoni.

Kedua beradik tersebut berserta pengikutnya telah merantau dan mendirikan kerajaan di Kota Pinang. Yang di Pertuan Kota Pinang inilah yang menurunkan raja-raja ke Kota Raja, Bilah, Kampung Raja dan Jambi. Adiknya Betara Gorga Pinanyungan di dapati bersalah belaku adil dengan sepupu sebelah ibunya yaitu Putri Rumandang Bulan. Oleh kerana tidak ada lagi pewaris tahta makanya putri tersebut ditunangkan dengan Raja Gayo. Sewaktu Putri Rumandang Bulan di bawa pergi ke Gayo beliau telah membawa satu tandan pinang masak lalu ditanamnya sebiji pinang tersebut pada setiap kali rombongan tersebut berhenti hinggalah sampai di tebing sebatang sungai.

Di tebing sungai itu baginda telah melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah dan perkasa. Ketika rombongan tersebut ingin meneruskan perjalanannya ke Gayo maka datanglah petir dan guntur yang amat dahsyat hingga kemah

mereka tidak dapat di buka. Begitulah keadaannya sehingga tujuh kali percobaan. Akhirnya seorang Datu telah memberitahu bahwa anak tersebut hendaklah ditinggalkan di atas batu di bawah pohon sena tempat ia dilahirkan kerana putera tersebut akan menjadi seorang raja yang besar di situ. Putri Rumandang Bulan enggan puteranya ditinggalkan karena dia ingin mati bersama anaknya, apabila Raja Gayo kelak mendapati bahwa dia bukan lagi perawan.

Di dalam keadaan tersebut tepancarlah pelangi maka menitilah tujuh orang bunian di ikuti oleh Dewa Mangala Bulan dari Kayangan. Puteri tersebut di simpan kedalam sungai berdekatan lalu bermandikan dengan bunga-bunga sena yang sedang berkembang. Apabila keluar dari sungai tersebut di dapati perut-perut yang menandakan baginda telah melahirkan tidak lagi kelihatan. Maka nama sungai tersebut di kenali sebagai “Aek Batang Gadis” artinya, air sungai yang memulihkan gadis/perawan. Anak yang ditinggalkan di bawah pohon sena tersebut telah di temui oleh rombongan Sultan Pulungan yang sedang memburu, lalu dipunggutnya.

Anak yang dibesarkan di dalam kandang di bawah rumah tersebut akhirnya telah berhasil melarikan diri dan mendirikan sebuah kerajaan dan kemudiannya mengalahkan Sultan Pulungan. Anak tersebut yang di kenali sebagai Sibaroar yaitu kandang di bawah rumah akhirnya menjadi raja besar di Penyabungan. Oleh karena raja di Penyabungan yang tersembunyi diketahui orang akan ibunya maka dipanggilah kerajaannya sebagai kerajaan “*Mande Nan Hilang*”, pendeknya Mandailing atau pun Mandehilang. Beliau juga adalah pengasas/penegak Marga

Nasution., artinya orang sakti. Ketika cerita kebesaran Sibaroar yang di gelar Sutan Diaru tersebar jauh ke Pagar Ruyung maka Yang Dipertuan Pagar Ruyung pun terkenang akan Putri Rumandang Bulan yang hamil di bawa ke Gayo⁴⁴.

3. Sekilas Tentang Adat Mandailing

Pelaksanaan perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Batak secara umum dan Mandailing pada Khususnya. Oleh karena hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama dan lain sebagainya adalah sesudah pesta perkawinan itu. Adapun pesta perkawinan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, ini adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Na Tolu*.

⁴⁴ Pangaduan Lubis, *Sejarah Mandailing*, yang di unduh dari [http: // akucinta-mandailing.wordpress.com](http://akucinta-mandailing.wordpress.com). hal ini di benarkan tokoh adat Desa Tambusai Barat, Mengingat sejarah Mandailing yang di ceritakan Ayahnya Bata Guru Nasution (Alm). Abidin Nasution, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 19 September 2010.

Perkawinan bagi orang Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi suami-isteri melulu, termasuk orang tua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak.

Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan sepasang suami-isteri maka putus pulalah antara dua kelompok tersebut. Kesimpulannya ialah perkawinan orang Batak haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat *Dalihan Na Tolu*, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah pelengkap. Perkawinan orang Batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut pandang adat *Dalihan Na Tolu*. Buktinya ialah apabila timbul keretakan didalam suatu rumah tangga, maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya.

Di daerah perantauan pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya masih diteruskan tradisi tentang pembagian jambar-jambar dan juga masih digunakan istilah-istilah seperti jambar pamarai dan lain sebagainya. Supaya jelas, itu semua perlu kita sorot dulu latar belakangnya di bona pasogit di zaman dulu sehubungan dengan perkawinan.

Mengenai peranan domu-domu (perantara) di zaman dulu, biasanya boru di suatu kampung. Pertama sekali tugasnya ialah menyampaikan lamaran seorang pemuda kepada sang gadis pilihan hatinya. Selain para perantara dari pihak orang

tua si gadis ada juga dari pihak si pemuda. Perundingan mereka secara tidak resmi dibelakang layar dinamai marhusip, artinya secara harfiah “berbisik”, dengan tujuan menghindari sedapat mungkin kegagalan pada waktu marhata sinamot, yaitu perundingan secara resmi mengenai peranan domu-domu (perantara) di zaman dulu dan mengenai besarnya mahar. Perundingan ini dilakukan di kampung tempat tinggal orang tua si puteri. Untuk itu yang bicara adalah para pengetua adat dari kedua pihak, yaitu pihak orangtua si pemuda dan pihak orangtua si puteri.

Sesudah ada kesepakatan mengenai besarnya mahar maka beberapa utusan dari parboru, yaitu orang tua dari siputeri, pergi maningkir lobu, artinya mengunjungi rumah orang tua sipemuda sambil melihat ternak yang akan menjadi mahar itu di dalam lobu (kandang). Disepakatilah harinya kapan ternak tadi, atau ternak-ternak kalau lebih dari satu, akan dihantarkan ke kampung parboru. Pada hari yang telah ditentukan itu sudah bersedia para penghuni kampung tersebut menantinya lalu membuka gerbang kampung itu. Yang memasukkan ternak itu kekandangannya ialah salah seorang saudara lelaki dari ayah siputeri. Oleh karena itulah ia dinamai pamarai, artinya “yang memasukkan ke kandang (bara)”⁴⁵.

⁴⁵ Lihat Marwan Dalimunte, *Adat Adopan Adongan Anjuon Tuttur*, yang di unduh dari <http://willmen46.wordpress.com>. hal ini di benarkan tokoh adat Desa Tabusai Barat. Besteng Harahap, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 13 September 2010. Panggabean Siregar, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 13 September 2010. Abidin Nasution, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 19 September 2010. Adnan Hasibuan, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 16 November 2010. Panjaitan Hasibuan, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 19 November 2010.

BAB IV

PENETAPAN MAHAR MENURUT ADAT MANDAILING DAN HUKUM ISLAM

A. Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Mahar

Suku Batak memiliki adat budaya yang baku yang disebut ”*Dalihan Na Tolu*” yang dapat menembus sekat-sekat agama/kepercayaan mereka yang berbeda-beda.

Adat budaya Batak memiliki tujuh nilai inti yaitu kekerabatan, agama, hagabeon, hamoraan, hukum dan ugari, pangayoman, dan marsisarian. Nilai kekerabatan atau keakraban berada di tempat paling utama dari tujuh nilai inti budaya utama masyarakat Batak. Nilai budaya hagabeon bermakna harapan panjang umur, beranak, bercucu yang banyak, dan baik-baik. Nilai hamoraan (kehormatan) terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan material yang ada pada diri seseorang. Nilai hukum (law) mutlak untuk ditegakkan dan pengakuannya tercermin pada kesungguhan dalam penerapannya dalam menegakkan keadilan. Nilai suatu keadilan itu ditentukan dari keta’atan pada ugari (habit) serta setia dengan padan (janji). Pengayoman (perlindungan) wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat. Marsisarian artinya saling mengerti, menghargai, dan saling membantu¹.

Dalam pelaksanaan adat di Indonesia sangat kental sesuai dengan adat masing-masing suku ataupun wilayah yang merupakan kebinnekaan bangsa

¹ Anwar Saleh Daulay, *Adat Budaya Batak Dalihan Natolu*, yang di unduh dari <http://dalihannatolu.blogdetik.com>.

Indonesia. Begitu juga dalam adat Mandailing sangat kental pelaksanaan adatnya sehingga dikenal dengan istilah” *Dalihan Na Tolu* ” artinya adat ” *Dalihan Na Tolu* ” secara harfiah berarti tiga tungku. Hal ini bisa dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur tempat meletakkan periuk. Maka adat Batakpun mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, yaitu (1) pihak semarga (in group), (2) pihak yang menerima istri (wife receiving party), (3) pihak yang memberi istri (giving party)².

Dengan perkawinan terjadilah ikatan dan integrasi diantara tiga pihak yang disebut diatas, seolah-olah mereka bagaikan tiga tungku di dapur yang besar gunanya dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Cukup banyak fungsi adat ini bagi masyarakat pendukungnya, diantaranya *patidohan holong* yang artinya menunjukkan kasih sayang di antara sesama yang penuh sopan santun/etika. Dari fungsinya yang penuh kehidmatan maka adat *Dalihan Na Tolu* dapat diterima oleh setiap etnis Batak sekalipun mereka berbeda-beda agama. Mereka yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Kadang-kadang begitu erat ikatannya karena konsep adat telah terbentuk sejak mulai lahirnya kelompok masyarakat yang identitas utamanya adalah adanya marga. Dengan marga itu orang Batak akan setia terhadap ketentuan adatnya di manapun mereka berada³. Jadi dengan adanya kekerabatan yang di tafsirkan di dalam adat *Dalihan Na Tolu*

² *Ibid*, hal tersebut di benarkan Panggabean Siregar, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 13 September 2010.

³ *Ibid*

maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan adat harus dilaksanakan dengan adat juga.

Penetapan mahar adalah bahagian dari pelaksanaan adat yang dilakukan dalam adat Mandailing pada umumnya, di Desa Tambusai Barat khususnya, hal ini adalah budaya adat yang dilakukan sejak adanya pelaksanaan adat di Desa Tambusai Barat⁴.

Dalam pelaksanaan penetapan mahar di Desa Tambusai Barat dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan. Adapun tata cara pelaksanaanya sebagai berikut : Setelah ditentukan hari penetapan mahar, sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang kerumah calon mempelai perempuan, maka utusan dari pihak perempuan datang kerumah calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan tentang hari penetapan mahar tersebut⁵. Setelah kaum kirabat dari calon mempelai perempuan telah berkumpul (Ayah, Ibu, Paman, Kakek, Nenek, Tulang, Bibi, dll) pada hari yang ditentukan, maka pihak laki – lakipun (Ayah, Ibu, Paman, Kakek, Nenek, Tulang, Bibi, dll) datang kerumah calon mempelai perempuan⁶. Sesampainya pihak calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, maka salah seorang dari pihak perempuan mempersilahkan duduk di

⁴ Abidin Nasution, *op,cit*

⁵ Panjaitan Hasibuan, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 19 November 2010

⁶ *Ibid.*

sebelah kanan rumah, setelah itu barulah acara di mulai. Adapun agenda acara sebagai berikut⁷ :

1. Pembukaan (salah seorang dari pihak perempuan)
2. Pendapat masing - masing terhadap kadar ukuran mahar yang akan di bebaskan kepada calon suami.
3. Cara pembayaran mahar.
4. Batas akhir penyerahan mahar oleh calon suami.
5. Waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimatul 'usy*.
6. Kesimpulan (hasil musyawarah) yang akan di bacakan oleh pembawa acara (protokol). Bila di perlukan⁸.

Di dalam adat Mandailing secara umum, di Desa Tambusai Barat khususnya, acara penyelesaian adat, seperti pertunangan, penetapan mahar, perkawinan, aqiqah dan lain sebagainya, selalu melalui musyawarah. Prosesi adat dalam adat Mandailing adalah sangat khusus, karena masing-masing dari unsur *Dalihan na tolu* mempunyai kesempatan dan hak untuk berbicara dengan menggunakan bahasa adat⁹.

Adapun susunan yang berbica dalam prosesi adat adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Juru bicara (protokoler) dari suhut.

⁷ Penetapan mahar Jupen Siregar dan Rasmi Hasibuan, *Opservasi*, Desa Tambusai Barat, 1 April 2009.

⁸ *Ibid*

⁹ Adnan Hasibuan, (Tokoh adat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 16 November 2010.

¹⁰ Lihat Pandapotan Nasution, *Adat Istiadat Angkola Mandailing*, yang di unduh dari <http://parsadaan.pulungan.blogdetik.com>.

2. Suhut (yang punya hajat acara)
3. Anak boru suhut (menantu yang punya hajat)
4. Pisang raut (ipar dari anak boru)
5. Paralok alok (peserta musyawarah yang turut hadir)
6. Hatobangon (Raja Kampung di kampung tersebut)
7. Raja torbing balok (Raja adat dari kampung sebelah)
8. Raja panusunan bulung (Raja di Raja adat)

Urutan berbicara, sebagaimana penulis maksudkan diatas, dihadirkan semua pada acara *makkobar godang* (munyawarah besar), yaitu acara musyawarah pesta perkawinan dan *mangupa* pada pesta perkawinan. Didalam acara penetapan mahar (makkobar menek) yang di ikut sertakan hanyalah dari pihak perempuan dan laki-laki yang dianggap penting¹¹, maka, urutan berbicara pada penetapan mahar dalam adat di Desa Tambusai hanya 2, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Setelah acara dimulai maka protokol mempersilahkan terlebih dahulu kepada pihak laki-laki untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan ungkapan kata sebagai berikut :

"Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarkatuh"

"Hormat nami tu mora nami songoni tu sude na hita namarlagut di bagas namora on".(Bahasa Mandailing).

Artinya : Yang kami hormati *mora*¹² beserta semua kaum kirabat yang telah berkumpul di rumah ini.

¹¹ Adnan Hasibuan, *op. cit.*

¹² Tutar (Panggilan) orang tua calon suami kepada orang tua calon istri.

"Di ari nasa borginon ro dohami, marjamita tuadopan ni mora bahaso jagar-jagar, nimora nami madung sahat ditalapak tangan nipinompar nami, anso ulang be agoan mora dijagar-jagar ni mora naso mulak sian bagas partandanganna, bope inte-intean dipinggan panganonna, mudah mudahan nian dohot izin ni Tuhan ta, madung margodang ni roha do mora manjagit hata boa nami". (Bahasa Mandailing).

Artinya : Pada malam ini kami datang kerumah ini memberitahu kepada *mora* bahwa sanya anak perempuan *mora* telah dibawa kerumah kami, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan mudah-mudahan *mora* bersenang hati dengan kedatangan kami.

"Dibagasan ni i marpokat martahi hami, pala daganak nangkan momolus dalam matobang, tontu sanoli bahat dei syarat dohot rukunna. ro hami dalam maalu –alu, tap songon na manyuruk pamispisan nimora, surdu burangir nami, burangir sirara uduk, sibontar adop-adop, dalam marguru na bisuk, pabohaon nadung dapot, burangir nahombang dua rangkap, hombang ma nian tahi pusuo dohot pokat". (Bahasa Mandailing).

Artinya : Setelah anak perempuan *mora* sampai di rumah kami, kami mengadakan musyawarah. Kedatangannya kerumah kami untuk menempuh pernikahan, dengan demikian tentu banyak syarat dan rukunnya. Kami datang kerumah *mora* membawa sirih yang merupakan satu tanda bahwa kami mau bermusyawarah, dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan.

"Jaon mada mora nami, haroro nami on tap songon namangido boban ma hami on, harupe nian boban na ami pangidoon, boban na nayang ma nian, biarpe gogo ompong na, asok ma nian dabuna, tap songon pardabu ni bulung ni torop, pala nagusar gusar do lehenon nimora name iringma nian dohot pangapoina, songoni juo pala na siborangkonon mora nami do ami on, siborangkon diaek na pejet ma nian".(Bahasa Mandailing).

Artinya : Kedatangan kami untuk bertanya kepada *mora* kira-kira berapa mahar yang akan dibebankan kepada kami. Namun, kami sangat mengharapkan kepada *mora* kiranya mahar yang dibebankan kepada kami jangan sampai menyusahkan, karena *mora* mungkin sudah tau bagaimana keadaan kami.

"Harana antong morangku haroro nami ngana dung ubanaon, tap songon siapor lunjung naso adong doon ulu panjujung na, na tais do abara pamorsananna, tap songon pajongjong rintu do ami on didanonna. Marari-ari antong mora nami jagar-jagar nimora nangkan obanon nami doon tu tonga-tonga ni paradatan songon titian batu naso ra buruk, andor na mangolu parsiraisanna. Mangido hami sagodang-godang ni pangidoan, anso majolo martoruk ni abara mora manjagit pangidoaan nami on. Hurang lobi ni pangkuling dohot pangalaho godang haropan dohot pangidoan dapot di moofkon, dohot nian pangidoannamion dapot ditarimo mora nami".(Bahasa Mandailing).

Artinya : Kedatangan kami tak ada bedanya dengan belalang yang tidak bisa dibebani apapun, kami tidak mempunyai harta yang banyak. Selanjutnya kamipun berencana untuk menyelenggarakan pernikahan antara anak kami dengan anak *mora*

sebagaimana mestinya dalam adat kita (Mandailing). Oleh karena itu kami meminta kepada *mora* kiranya permintaan kami dapat dikabulkan. Kekurangan dan kesalahan dalam perkataan dan perbuatan mohon di ma'afkan.

*"Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarkatuh"*¹³.

Kemudian protokol mempersilahkan kepada pihak perempuan untuk menjawab (menanggapi) apa yang disampaikan oleh pihak laki-laki. Pihak perempuan menyampaikan dengan kata adat pula.

"Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarkatuh"

"Hormat nami tu anak boru nami songoni tu sude na hita namarlagut di bagas namartu on".(Bahasa Mandailing).

Artinya : Yang kami hormati *anak boru*¹⁴ beserta seluruh kaum kirabat yang telah berkumpul di rumah yang bertuah ini.

"Taringot di hata dohot boa-boa ni anak boru nami, madung torang dohot tangkas do da hami bege, bahaso jagar-jagar nami nadung sadari inda mulak tu partandanganna. Hara ni i, hami pe inda agoan bibe".

"Sian hata ni anak boru nami, " pala daganak nangkan momolus dalam matobang" tama dohot tubbuk madai hata ni anak boru nami, tong hami pe da margodang ni roha do da di haroro ni anak buru nami". Burangir na madung hami algei pe nian manjadi borkat ma di tahitta di ari nasa bornginon".(Bahasa Mandailing).

¹³ Adnan Hasibuan, *op. cit.* Perkataan Pihak Laki-laki yang dikutip tokoh adat. Perkataan diatas tidak persis seperti apa yang di katakan oleh pihak laki-laki, namun tujuannya sama.

¹⁴ Tutar (Panggilan) orang tua calon istri kepada orang tua calon suami

Artinya : Teringat apa yang telah disampaikan *anak boru*, sudah jelas kami dengarkan bahwasanya anak kami sudah berada dirumah *anak boru*. Oleh karena itu kamipun tidak kehilangan lagi.

Artinya : Kemudia *anak boru* menyampaikah bahwa bahwa kedatangan anak kami dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan, hal ini adalah satu hal yang baik yang merupak keinginan kita semua, kamipun bersenang hati dengan kedatangan *anak boru*. Selanjutnya sirih yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan membawa berkah dalam acara kita ini.

"Di haroro ni anak boru nami namangido baban padomu hata dohot pokat, tontu di hakehe ni jagar-jagar nami si bagas partandanganna, madong parjalo doi hami marpokat nagiot mangalehen boban di anak boru nami, harupe bobanon nagiot lehen nami on tu anak boru nami boban mamboratkan". Di pangaloho ni adat ni omputta naparjolo madung tangkas dohot torang do da hita boto bahasona boban ni anak boru na ima manimus alaman ni morana, tontu tong anak boru nami pe bisa patuadongna. Sambalik siani buse, molo hita lingi ma tu perkembanga ni jaman, tontu tong leng angkon namargogo ni abara do da anak boru nami manaribo boban nagiot lehenon ni hami mora muyu. Songon pandokkon ni natobang muda hum mora hita tontu tong na pamo hita doi, muda inda hita pamora tontu dohot do hita inda mamora. Jadi sian hara ni i martoruk ni abara ma nian anak boru nami. Pangidoan sian hami mora muyu ulang be nian di toru ni na 10 jt¹⁵.(Bahasa Mandailing).

¹⁵ Kadang-kadang kadar mahar yang ditetapkan sangat memberatkan pihak laki-laki, lebih dari 10 jt. sehingga terjadilah penundaan pernikahan. Karena penetapan mahar belum selesai.

Artinya : Kedatangan *anak boru* menanyakan tentang mahar yang akan kami bebaskan, tentu sebelumnya kami sudah musyawarah tentang mahar yang akan kami bebaskan kepada *anak boru*, sekalipun mungkin mahar yang akan kami minta dapat memberatkan kepada *anak boru*. Kalau kita melihat adat yang dilestarikan nenek moyang kita terdahulu tentu kita sudah mengetahuinya, yaitu menyelesaikan pernikahan anak kita sampai selesai dan memberikan mahar. Kemudian bila kita lihat perkembangan zaman tentu berapa yang kami minta *anak boru* bisa menyediakannya. Seperti kata orang tua kita terdahulu, kalau kita tunjukkan anak kita sebagai anak yang berharga tentu kitapun ikut berharga, sebaliknya kalau kita jadikan anak-anak kita tidak berharga tentu kita juga ikut tidak berharga. Jadi singkatnya kami meminta ke *anak boru* jangan dibawah 10 jt.

"Tarsaon ma hata sian hami hurang lobi ni pakkatai hami parjolo mangido moof". (Bahasa Mandailing)

Artinya : Kira-kira demikianlah yang dapat saya sampaikan, jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon di maafkan.

*" Wassalmu 'alikum warohmatullahi wabarkatuh "*¹⁶.

Kemudian setelah terjadi tawar menawar antara pihak laki-laki dan perempuan, barulah di lanjutkan kepada agenda selanjutnya. Seperti Prosesi penetapan mahar *Abdul Ghofur/Asmidar*. Ketika ditanya, *Abdul Ghofur* menjawab: Pertama kali pihak istri menetapkan Rp 20.000.000. lalu, pihak keluarga saya meminta Rp 8.000.000, karena hanya itulah kemampuan keluarga saya. Sehingga pernikahan di tunda hingga 4 hari, kemudian musyawarah lagi,

¹⁶ Adnan Hasibuan, *op. cit.* Perkataan Pihak Perempuan yang dikutip tokoh adat. Perkataan diatas tidak persis seperti apa yang di katakan oleh pihak laki-laki, namun tujuannya sama.

pada musyawarah kedua, pihak istri menetapkan Rp 18.000.000, kami meminta Rp 10.500.000. namun pihak istri tidak memperkenankan, ketetapan itupun pihak kami tidak mampu, maka solusi terakhir kami lari dan kami menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali istri satupun tak ada yang mau menikahkan kami. Karena peristiwa itu sampai sekarang kami dianggap oleh pihak istri bukan bagian dari keluarga mereka. Ketika *Asmidar* ditanya tentang penetapan mahar, ia menjawab: betul apa yang disampaikan suami saya. Ketika ditanya apakah ia ridho dengan keadaan tersebut ia menjawab: ya, karena yang mau kawinkan saya bukan orang tua saya, tentu kesepakatan kami berdua yang dijalankan¹⁷.

Penetapan mahar *Abdul Rahim/Nuraini*. Protokol mempersilahkan kepada pihak perempuan menyampaikan apa yang perlu disampaikan, kemudian pihak laki-laki, ketika meminta tentang mahar yang akan dibebankan kepada laki-laki, pertama kali pihak perempuan meminta Rp 17.500.000, lalu pihak laki-laki meminta Rp 9.000.000, kemudian pihak perempuan meminta 15.500.000. Karena itu permintaan terakhir perempuan maka pihak laki-laki menerimanya dengan pembayaran Rp. 5.000.000. uang tunai dan kekurangan hutang dengan jangka waktu \pm 1 tahun¹⁸.

Penetapan mahar *Ali Sukarman/Siti Nurhayati*. Dalam acara penetapan mahar, pertamanya di diminta pihak calon istri Rp. 10.500.000, kemudian pihak calon suami meminta dikuangi, pihak calon istri mengurangi menjadi Rp 10.000.000, kemudian pihak calon suami meminta Rp 8.500.000. pihak calon istri setuju

¹⁷ Abdul Ghofur/Asmidar (Anggota Masyarakat), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat, 4 April 2010.

¹⁸ Penetapan mahar Abdul Rahim/Nuraini, *Observasi*, Desa Tambusai Barat 10 Maret 2010.

dengan hal tersebut. Akhirnya penetapan mahar tersebut berjalan lancar dengan mahar sebesar Rp 8.500.000¹⁹.

Penetapan mahar *Abdul Halim/Siti Zubaidah*. Ketika *Abdul Halim* di tanya tentang prosesi penetapan mahar, beliau mengatakan: Pertama kami musyawarah pihak calon istri meminta mahar : Tanah seluas 1 ha ditambah uang sebesar Rp 5.000.000. Karena keluarga saya tidak sanggup, maka meminta dikurangi, lalu dikurangi menjadi tanah 1 ha ditambah uang Rp 3.000.000. tapi hal itupun rasanya kami tidak mempunyai kemampuan, kami meminta jangan pakai tanah akan tetapi uang saja Rp 7.500.000. Karena kami orang miskin. Karena pihak calon istri saya tidak setuju dengan permintaan kami akhirnya pihak keluarga saya mohon izin untuk ditunda musyawarahnya. Setelah dua hari kemudian, musyawarah dilanjutkan lagi. Tetapi tidak ada perubahan, padahal kami sudah menambah dari sebelumnya. menjadi Rp 8.500.000. Namun, pihak istri masih tetap dengan kesepakatan mereka. Maka pihak saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Ketika *Siti Zubaidah* di tanya ia memberikan penjelasan sebagai berikut: Apa yang dikatakan *Abdul Halim* itu benar, karena apalah daya saya seorang perempuan, saya tak bisa membantah orang tua saya, karena bagaimanapun saya sudah dibesarkan, sudah diberi nafkah, sudah dibiayai sekolah, dan lain sebagainya. Jadi apapun keputusan orang tua tetap saya setujui²⁰.

¹⁹ Penetapan mahar Ali Sukarman/Siti Nurhayati, *Observasi*, Desa Tambusai Barat 23 April 2010.

²⁰ Abdul Halim/Siti Zubaidah (Anggota Masyarakat) , *Wawancara*, Desa Tambusai Barat, 4 April 2010.

Penetapan mahar *Ahmad Rifa'i/Maisa*. Penetapan mahar *Ahmad Rifa'i/Maisa* berjalan dengan lancar. Dalam musyawarah penetapan mahar tersebut pihak perempuan meminta Rp 30.000.000. kemudian pihak laki-laki meminta untuk dikurangi, pihak perempuan mengurangi menjadi Rp. 28.000.000, tapi hal itu masih diminta pihak laki-laki untuk dikurangi, lalu pihak perempuan bertanya berapa kesanggupan pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki meminta Rp 25.000.000 dengan konsekuensi tiga kali bayar. Hal itu disetujui pihak perempuan. Akhirnya mahar yang ditetapkan Rp 25.000.000²¹.

Namun sering di temukan penetapan mahar di *pending* karena pihak laki-laki belum bisa menerima permintaan dari pihak perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut ini.

Tabel VIII

Jawaban Rresponden Tentang Kelancaran Prosesi Penetapan Mahar

No	Kelancaran penetapan mahar	Jumlah	Persentase
1	Ya/Lancar	2 Orang	6,67 %
2	Di Tunda Beberapa hari	24 Orang	80 %
3	Batal	4 Orang	13,33 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa prosesi penetapan mahar di Desa Tambusai Barat mayoritasnya di tunda beberapa hari, yaitu 24 orang atau

²¹ Penetapan mahar *Ahmad Rifa'i/Maisa*, *Observasi*, Desa Tambusai Barat 25 November 2009.

80 %. Dengan di tundanya penetapan mahar tersebut terjadilah penundaan perkawinan (akad nikah). Seyogianya mahar itu di permudah, jangan di persulit. Sementara, yang berjalan lancar hanya 2 orang atau 6,67 %, dan yang batal 4 orang atau 13,33 %.

Penundaan penetapan mahar dalam adat Mandailing Desa Tambusai Barat disebabkan besarnya kadar mahar yang di minta pihak perempuan yang dapat memberatkan kepada calon suami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IX

**Jawaban Responden Tentang Jumlah Mahar Yang Di Tentukan Melalui
Musyawarah Kedua Belah Pihak**

No	Jumlah Mahar	Jumlah	Persentase
1	< Rp 10.000.000	3 Orang	10 %
2	Rp 10.000.000-15.000.000;	7 Orang	23,33 %
3	Rp 15.000.000-20.000.000;	17 Orang	56,67 %
4	> Rp 20.000.000;	3 Orang	10 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa mahar yang di bebaskan kepada suami sangat mahal, bila dibandingkan dengan perekonomian masyarakat Desa Tambusai Barat. Mayoritasnya Rp 15.000.000-20.000.000 yaitu 17 orang atau 56,67 %, Rp 10.000.000-15.000.000 yaitu 7 orang atau 23,33 %, > Rp 20.000.000 yaitu 3 orang atau 10 %, sedangkan < Rp 10.000.000. hanya 3 orang atau 10 %.

Ketika di tanya tentang kadar ukuran mahar tokoh adat memberikan jawaban, bahwa kadar mahar dalam adat Madailing zaman dahulu bernilai pound atau kepingan emas. Namun, karena pound atau kepingan emas sulit di dapatkan, maka hal itu di rupiahkan, yaitu 10.000.000-100.000.000. Namun demikian, diberikan keringan kepada calon suami untuk membayar pada waktu yang telah di tentukan (tidak tunai). Hal lain yang membuat kadar mahar itu mahal adalah sebagai salah satu penentu ketinggian harkat dan martabat kedua belah pihak²².

Ketika Tokoh agama di tanya tentang kadar mahar tersebut, ia menjawab, ketentuan mahar itu untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, karena pada masa sekarang, perceraian bukanlah hal yang luar biasa lagi. Tontonan-tontonan merupakan contoh buat mereka, tanpa memikirkan masa depan anak istrinya. Oleh sebab itu saya sebagai Tokoh agama setuju dengan besarnya kadar mahar dalam adat Mandailing umumnya, di Desa Tambusai Barat ini khususnya²³.

Suami yang memberikan mahar, memberikan jawaban melaui angket yang penulis sebarikan, mayoritasnya keberatan dengan ketentuan mahar yang di bebaskan kepadanya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini.

²² Panggabean Siregar., *op.cit* Demikian juga tokoh adat yang lain, Adnan Hasibuan, Abidin Nasution, Panjaitan Hasibuan, dan Besteng Harahap.

²³ Adnan Nasution (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Tambusai Barat 13 September 2010. Demikian juga tokoh Agama yang lain. Khairuddin, Muhammad Fauji, Kumpul Nasution dan Mara Zuki Nasution.

Tabel X
Jawaban Tentang Perasaan Responden
Terhadap Ketetapan Mahar

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sangat Memberatkan	7 Orang	23,33 %
2	Memberatkan	21 Orang	70 %
3	Tidak Memberatkan	2 Orang	6,67 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa responden mayoritasnya memberatkan dengan mahar yang di tetapkan dalam prosesi penetapan mahar, yaitu 21 orang atau 70 %, sangat memberatkan 7 orang atau 23,33 %, sedangkan yang tidak memberatkan 2 orang atau 6,67 %.

Prosesi penetapan mahar di lanjutkan setelah beberapa hari, prosesi ini slalu di laksanakan melalui musyawarah keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki yang di anggap penting. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel XI
Jawaban Renponden Tentang Proses Penetapan Mahar

No	Proses Penetapan Mahar	Jumlah	Persentase
1	Musyawarah Bapak dan Ibu	-	-
2	Musyawarah Bapak,Ibu dan Anak	-	-
3	Musyawarah Keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki yang di anggap penting	30 Orang	100 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Tabel diatas menjelaskan bahwa prosesi penetapan mahar secara keseluruhan melalui Musyawarah Keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki yang di anggap penting, yaitu 30 orang atau 100 %.

Setelah dapat kesepakatan, dilanjutkan kepada agenda acara berikutnya. Yaitu cara pembayaran mahar, apakah secara tunai atau tidak. Pembayaran mahar di Desa Tambusai Barat kebiasaannya tidak dibayar secara tunai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel XII
Jawaban Responden Tentang
Cara Pembayaran Mahar Kepada Istrinya

No	Cara Pembayaran mahar	Jumlah	Persentase
1	Tunai	3 Orang	10 %
2	Tidak Tunai	27 Orang	90 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa cara pembayaran mahar di Desa Tambusai Barat mayoritasnya tidak secara tunai, karena 27 orang atau 90 % memberikan mahar kepada istrinya tidak secara tunai. Yang menjawab tunai hanya 3 orang atau 10 %. Seyogyanya mahar itu dibayar tunai walaupun seperangkat alat shalat ataupun cincin dari besi.

Prosesi penetapan mahar di Desa Tambusai Barat jarang tidak pernah di jumpai calon istri terlibat di dalamnya, seolah olah calon istri itu tidak punya hak terhadap maharnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel XIII

**Jawaban Responden Tentang Kehadiran Calon Istri Pada Prosesi Penetapan
Mahar**

No	Kehadiran Istri	Jumlah	Persentase
1	Hadir	-	0 %
2	Tidak Hadir	29 Orang	96,67 %
3	Boleh Hadir Boleh Tidak	1 Orang	3,33 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas calon istri tidak hadir dalam prosesi penetapan maharnya. Karena yang menjawab tidak hadir sebanyak 28 orang atau 96,67 %. Yang menjawab Boleh Hadir Boleh Tidak (Tidak Ingat) adalah 1 orang atau 3,33 %. Sedangkan yang menjawab hadir, tidak ada. Seyogyanya istri menghadirinya, karena istri mempunyai hak penuh terhadap maharnya. Dan dalam hal ini juga izin dari calon istri tidak pernah diminta oleh orang tua hal ini diketahui melalui angket yang telah penulis sebar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel XIV**Jawaban Responden Tentang Izin Calon Istri Untuk Penetapan Mahar**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya, Izin Calon Istri	-	0 %
2	Tidak, Izin Calon Istri	30 Orang	100 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa orang tua tidak pernah minta izin kepada anaknya (calon istri). Karena 30 orang atau 100 % menjawab tidak, izin calon istri dan yang menjawab ya, izin calon istri tidak seorangpun, atau 0 %.

Ketika tokoh adat ditanya tentang ketidak hadirannya calon istri dan tentang izin calon istri dalam penetapan mahar, tokoh adat memberikan jawaban sebagai berikut : Sejak adanya pelaksanaan adat di Desa Tambusai Barat ini belum pernah di ikutkan calon istri dalam menetapkan mahar, karena menurut kami (Mandailing) sebelum anak menikah, seluruhnya masih dalam tanggungan orang tua, seperti sandang, pangan, termasuk masalah mahar, dan lain-lain²⁴.

Tokoh agama memberikan jawaban sebagai berikut : Kehadiran calon istri adalah suatu keharusan sebagai orang yang mempunyai hak terhadap maharnya. Tapi, bukan suatu kewajiban. Begitu juga dengan Izinnya, dan selama ini juga

²⁴ Panggabean Siregar, *Op.Cit*

tidak pernah ada protes tentang izin itu. Tentu kami mengikut apa yang di jalankan menurut adat kebiasaan di Desa Tambusai Barat ini²⁵.

Agenda selanjutnya Batas akhir penyerahan mahar oleh calon suami. Batas akhir penyerahan mahar oleh calon suami kepada calon istri juga di tetapkan pada saat makkobar menek. Batas akhir penyerahan mahar ini biasanya di bawah 1 tahun, namun, ada juga yang lebih dari 1 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel XV

Jawaban Responden Tentang Batas Akhir Penyerahan Mahar

No	Akhir pembayaran mahar	Jumlah	Persentase
1	Kurang dari 1 tahun	24 Orang	80 %
2	1 tahun	2 Orang	6,67 %
3	Lebih dari 1 tahun	1 Orang	3,33 %
4	Tanpa Batas	3 Orang	10 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat, untuk batas akhir pembayaran mahar ditentukan pula. Adapun batasannya mayoritasnya kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 80 %, adapun yang 1 tahun 2 orang atau 6,67 %, lebih dari 1 tahun 1 orang atau 3,33 %, sedangkan yang tanpa batas 3 orang atau 10 %, karena mereka bayar dengan tunai.

²⁵ Adnan Nasution, *Op. Cit.*

Kemudian agenda berikutnya hari pelaksanaan akad nikah. Waktu pelaksanaan akad nikah biasanya dilaksanakan paling cepat 1 hari dari dari penetapan mahar, dan paling lama 3 hari. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel XVI

**Jawaban Responden Tentang Waktu Pelaksanaan Akad Nikah Setelah
Penetapan Mahar**

No	Jangka Waktu	Jumlah	Persentase
1	1 Hari	28 Orang	93,34 %
2	2 Hari	1 Orang	3,33 %
3	3 Hari	1 Orang	3,33 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah setelah selesai penetapan mahar mayoritasnya 1 hari yaitu 28 orang atau 93,34 %, yang 2 hari 1 orang atau 3,33 %, sedangkan yang 3 hari hanya 1 orang atau 3,33 %.

Walimatul 'ursy di Desa Tambusai Barat biasanya dilaksanakan 4 hari setelah akan nikah. Namun, ada yang langsung pada hari akad nikah tersebut, dan ada juga yang tidak ditentukan pada hari penetapan mahar itu (Kondisional). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel XVII
Jaban Responden Tentang Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*
Setelah Akad Nikah

No	Walimatul 'Ursy	Jumlah	Persentase
1	Pada hari akad nikah	3 Orang	10 %
2	4 Hari setelah akad	21 Orang	70 %
3	Lebih dari 4 hari	2 Orang	6, 67 %
4	Tidak di tentukan	4 Orang	13, 33 %
	Jumlah	30 Orang	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* dilaksanakan mayoritasnya 4 hari setelah akad, yaitu 21 orang atau 70 %, tidak di tentukan sebanyak 4 orang atau 13,33 %, pada hari akad nikah 3 orang atau 10 %, dan yang lebih 4 hari hanya 2 orang atau 6,67 %.

Kemudian agenda berikutnya yaitu Kesimpulan²⁶. Kesimpulan penetapan mahar Jupen Siregar dan Rasmi Hasibuan adalah sbb :

1. Mahar sebesar Rp 10.500.000;
2. Cara pembayaran mahar : uang pangkal Rp 3.500.000; dan hutang Rp 7.000.000;
3. Batas akhir pembayaran mahar tidak di tentukan.

²⁶ Rangkaian acara penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat. Demikian juga penetapan mahar Ahmad Rifai dan Maisa, *Observasi*, Desa Tambusai Barat 25 November 2009, Abdul Rahim dan Nurlaini, *Observasi*, Desa Tambusai Barat 10 Maret 2010. Namun, kesimpulan berbeda.

4. Waktu pelaksanaan akad nikah 1 hari setelah penetapan mahar dan *walimatul 'ursy*nya 4 hari setelah akad nikah.

B. Dampak Positif dan Negatif Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan

a. Dampak Positif

Penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat menjadi sebuah referensi bagi masyarakat Mandailing karena mempunyai beberapa dampak positif terhadap kelangsungan pernikahan. Seperti :

1. Adanya sifat hagabeon, hamoraon (sifat istimewa) bagi mempelai dan kaum famili (keluarga) pada saat pernikahan maupun pada saat *walimatul 'ursy*²⁷.
2. Terjadinya sifat harga menghargai, hormat menghormati antara kedua belah pihak dengan tokoh adat dan agama pada saat pernikahan maupun diluar pernikahan²⁸.
3. Pernikahan dan *walimatul 'ursy* berjalan dengan mulia²⁹.
4. Terhitung sebagai orang yang dihargai di Desa Tambusai Barat³⁰.
5. Dalam menjalani hidup berumah tangga terlihat aman dan tenteram karena semua pihak senang dengan mereka, khususnya orang tua dari suami dan istri.

²⁷ Adnan Hasibuan, *loc.cit.*

²⁸ Besteng Harahap, *loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Panggabean Siregar, *loc.cit.*

b. Dampak Negatif

Dampak negatif penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan di Desa Tambusai Barat adalah sbb :

1. Tertundanya pelaksanaan akad nikah³¹.
2. Adanya rencana pernikahan yang di batalkan³².
3. Terjadinya nikah sirri³³.
4. *Walimatul 'usry* hanya dilaksanakan satu pihak³⁴.
5. Melonggarnya nikah sesama suku.
6. Dalam menjalani hidup bermasyarakat terjadi kejanggalan-kejanggalan khususnya dalam penyelenggaraan adat.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar

Penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat pada masyarakat Mandailing secara umum, khususnya di Desa Tambusai Barat. Penetapan mahar tersebut di laksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon istri yang di hadiri oleh pihak calon istri dan calon suami yang dianggap penting. Penetapan mahar di Desa Tambusai Barat adalah bahagian dari *'urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan masyarakat Desa tersebut. Menurut hemat penulis penetapan mahar yang dilakukan di Desa tersebut adalah bahagian dari *'urfun shohih* yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai

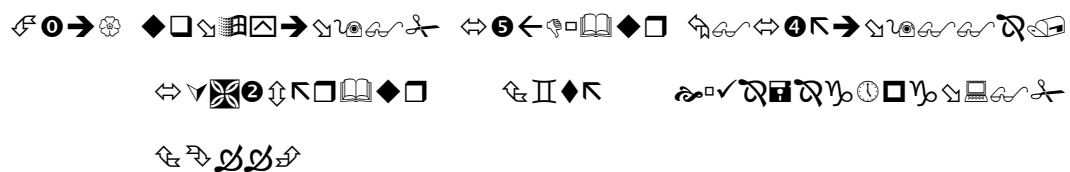
³¹ Abdul Ghofur, *loc.cit.*

³² Abdul Halim, *loc.cit.*

³³ Abdul Ghofur, *loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*

menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dalam hal *'urfun shohih* Allah SWT memerintahkan untuk selalu dilaksanakan. Sebagaimana firman-Nya di dalam al Quran surah al A'raf : 199.



Artinya : "Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf (*al 'urf*) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa penetapan mahar di Desa Tambusai Barat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan, seperti : Tertundanya pelaksanaan akad nikah, terjadinya nikah sirri, Adanya rencana pernikahan yang di batalkan, *Walimatul 'usry* yang hanya dilaksanakan oleh satu pihak, dan Melonggarnya nikah sesama suku. Namun, penulis melihat, bahwa penyebab dari semua hal tersebut karena besarnya kadar mahar yang diminta oleh pihak calon istri itu sendiri. Dalam hal besarnya kadar mahar tidak ada larangan dalam Alquran maupun Sunnah Rasulullah SAW, namun Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin. Sebagaimana dijelaskan dalam Haditsnya yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Maskawin yang paling baik itu adalah yang mudah"³⁵.

³⁵ Ibnu Hajar al'Asqolani, *Bulughul Marom min adallatil Ahkam*, (Jeddah : Alharomaini Liththoba'ati Wannasyari Wattaazi'i, tt), h. 225.

Kemudian setelah melakukan pengamatan dan penilaian terhadap dampak dari penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan melalui wawancara dengan responden, penulis melihat bahwa dalam penetapan mahar tersebut terdapat dua kumudharatan yaitu, *Pertama* dengan tingginya kadar mahar yang diminta pihak calon istri dalam penetapan mahar maka kebanyakan dari pihak laki-laki merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. *Kedua* bila kadar mahar itu rendah maka di khawatirkan akan meraja lelaya perceraian. Dalam kasus seperti ini Ulama fiqh menjelaskan bahwa apabila ada satu perbuatan yang mempunyai dua mudharat maka boleh dikerjakan yang lebih sedikit mudharatnya. Dengan qaidah sebagai berikut :

Artinya : ”Diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudharat”³⁶.

Dengan demikian menurut hemat penulis penetapan mahar di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan menurut hemat penulis lebih tinggi kadar mahar yang ditetapkan pada prosesi penetapan mahar tersebut adalah lebih baik.

³⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-2, h.20.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu merupakan pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu*, di laksanakan dengan musyawarah kedua belah pihak. Dilaksanakan secara khusus di rumah pihak perempuan dengan mengumpulkan famili dari pihak laki-laki dan perempuan. Penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai selalu menggunakan bahasa adat.
2. Tata cara penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat merupakan persetujuan dari tokoh adat dan tokoh agama. Ketetapan mahar yang di tetapkan dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat terdapat dampak negatif yang sangat signifikan terhadap kelangsungan pernikahan, yaitu :
 - a. Tertundanya pelaksanaan akad nikah
 - b. Terjadinya nikah lari (nikah sirri)
 - c. Adanya pernikahan yang di batalkan
 - d. Walimatul 'ursy hanya dilaksanakan satu pihak.
 - e. Melonggarnya nikah sesama suku
3. Penetapan mahar yang keputusan didominasi pihak perempuan, banyak dari pihak laki-laki yang merasa keberatan dengan hal tersebut, karena

menyebabkan, bahkan mempengaruhi mahalny kadar mahar yang diminta pihak perempuan dalam prosesi penetapannya.

4. Penetapan mahar yang mahal dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati penetapan mahar dalam adat Mandailing dan dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, penulis dengan berbesar hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Tokoh Adat kiranya untuk lebih melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya penetapan mahar.
2. Kepada Tokoh Agama agar mendahulukan *Nash* dalam mengambil keputusan (membuat aturan) dibanding adat istiadat, supaya nikah sirri tidak terjadi.
3. Kepada Orang tua calon istri agar lebih melihat kepada kebahagiaan anak dan keadaan ekonomi pihak calon suami.
4. Kepada Pemuda jangan boros, mulailah berpikir untuk masa depanmu, jangan sampai menyusahkan kepada orang tua.
5. Kepada Pemuda pelajari Syari'at. Jangan sampai hakmu di rampas oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik, Prof. Dr. H., (HAMKA), *Tafsil Al-azhar Jilid 2*, (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), Cet. Ke-5.
- Agama Republik Indonesia, Departemen, *Al Qur an dan Tafsirnya Jilid II*, (Semarang : Effhar Offset, tt).
- _____, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), Cet. ke-4
- Abdurrahman, Abdullah, bin, al Bassam, *Syarah Bulughul Marom*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 5.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1985). Cet. ke-3.
- Data Desa Tambusai Barat bulan April 2010.
- Dalimunte, Marwan, *Adat Dalihan Natolu*, di unduh dari [http:// sirajasonang.wordpress.com](http://sirajasonang.wordpress.com).
- _____, *Adat Adopan Adongan Anjuon Tuttur*, yang di unduh dari [http:// willmen46.wordpress.com](http://willmen46.wordpress.com).
- Dedi Rohayana, Ade, DR, M. Ag, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), cet. Ke-1.
- Efendi, M, Zein, Satria, Prof. Dr. H. MA, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) Ed.1, Cet. Ke-2, h. 155.
- Farid Muhammad Washil, Nashr, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-2, h.20.
- Ghazaly, Abd. Rahman, Dr. H. MA, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) ed. 1, cet. Ke-1
- Hajar, Ibnu, al'Asqolani, *Bulughul Marom min adallatil Ahkam*, (Jeddah : Alharomaini Liththoba'ati Wannasyri Watta'uzi'i, tt).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al' Alamah, Penerjemah Rusnan Yahya, *Hukum-hukum Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), Cet. Ke-1
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentara, 2001), Cet. Ke-7
- _____, *Fiqh Lima Mazhab 2*, (Jakarta : PT. Basrie Press, 1994), Cet .Ke- 1.
- Lubis, Pangaduan, *Sejarah Mandailing*, yang di unduh dari [http: // akucinta-mandailing.wordpress.com](http://akucinta-mandailing.wordpress.com)

- Mas'ud, Ibnu, H, Drs,_____ *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, jilid 2.
- Mubarak, Jaih *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta : Raja Grafindi Persada, 2002), ed. 1, Cet. Ke-1.
- Mu'in, A, Drs, H, dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad* (Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h.209.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), Cet ke-1, Jilid 1.
- Nasution, Pandapotan, *Adat Istiadat Angkola Mandailing*, yang di unduh dari <http://parsadaanpulungan.blogdetik.com>.
- Nelli Jumni, M. Ag, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008).
- Pangaduan, Z, Lubis, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, di unduh dari <http://definisi-pengertian.blogspot.com>.
- Rahman I, Abdul, Prof. Doi, Ph. D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996) Cet. ke- 2.
- Rifa'I, Mohd, Drs., *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, th).
- Saleh, Anwar, Daulay, *Adat Budaya Batak Dalihan Natolu*, yang di unduh dari <http://dalihannatolu.blogdetik.com>.
- Sayyid Quthb, Syahid, Penerjemah : As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hasan, *Tafsir Fi Zhilalil Qur an*,(Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.Ke- 1
- Tihami, H.M.A, Prof. Dr. H. MA, M.M, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), ed.1, Cet.Ke -1.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov. Riau
2. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu
3. Rekomendasi Camat Tambusai
4. Rekomendasi Kepala Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai
5. Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Kepala Desa Tambusai Barat
6. Lembaran Pengesahan Perbaikan Ujian Seminar Proposal
7. Surat Keterangan Lulus Ujian Comprehensif
8. Surat Undangan Mengadiri Ujian Sarjana
9. Dispensasi Peminjaman Buku
10. Surat Keterangan telah Menyerahkan Jurnal
11. Lembaran Pengesahan Perbaikan Skripsi
12. Daftar Riwayat Hidup

Catatan :

Lampiran yang saya sebutkan diatas adalah foto copy.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I : Klasifikasi Penduduk Desa Tambusai Barat	
Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel II : Klasifikasi Penduduk Desa Tambusai Barat	
Menurut Kelompok Umur	18
Tabel III : Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Tambusai	
Barat Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel IV : Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Tambusai	
Barat	21
Tabel V : Klasifikasi Tempat Peribadatan di Desa Tambusai	
Barat	23
Tabel VI : Klasifikasi Jumlah Pemeluk Agama Desa	
Tambusai Barat.....	24
Tabel VII : Klasifikasi Mata Pencarian Masyarakat	
Desa Tambusai Barat	26
Tabel VIII : Jawaban Responden Tentang Kelancaran Prosesi	
Penetapan Mahar	66
Tabel IX : Jawaban Responden Tentang Jumlah Mahar	
Yang Di Tentukan Melalui Musyawarah Kedua Belah	
Pihak	67
Tabel X : Jawaban Tentang Perasaan Responden	
Terhadap Ketetapan Mahar	69

Tabel XI	:	Jawaban Responden Tentang Proses Penetapan Mahar.....	70
Tabel XII	:	Jawaban Responden Tentang Cara Pembayaran Mahar Kepada Istrinya	71
Tabel XIII	:	Jawaban Responden Tentang Kehadiran Calon Istri Pada Prosesi Penetapan Mahar	72
Tabel XIV	:	Jawaban Tentang Izin Calon Istri Untuk Penetapan Mahar	73
Tabel XV	:	Jawaban Responden Tentang Batas Akhir Penyerahan Mahar	74
Tabel XVI	:	Jawaban Responden Tentang Waktu Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Penetapan Mahar	75
Tabel XVII	:	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan <i>Walimatul 'usy</i>	76

ANGKET

Nama Suami :

Nama Istri :

Kedudukan* :

Petunjuk Pengisian Angket :

✚ Lingkirlah salah satu antara a,b,c,d atau e yang sesuai dengan apa yang terjadi pada Bapak dengan benar.

✚ Segala sesuatu yang terjadi akibat angket ini tidak dibebankan pada responden.

✚ Terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

1. Tahun berapakah Bapak menikah ?
 - a. 2008
 - b. 2009
 - c. 2010
2. Apakah pendidikan terakhir Bapak ?
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Lainnya
3. Apakah pekerjaan Bapak ?
 - a. Tani
 - b. PNS
 - c. Swasta
 - d. Wiraswasta
4. Berapakah besarnya mahar yang dibebankan kepada Bapak ?
 - a. < Rp 10.000.000;
 - b. 10.000.000-15.000.000;
 - c. 15.000.000-20.000.000;
 - d. > Rp 20.000.000;
5. Bagaimanakah perasaan Bapak terhadap mahar yang dibebankan kepada Bapak ?
 - a. Sangat Memberatkan
 - b. Memberatkan
 - c. Tidak Memberatkan

6. Apakah orang tua minta izin kepada istri Bapak untuk menetapkan maharnya ?
 - a. Ya, Izin Calon Istri
 - b. Tidak, Izin Calon Istri
7. Bagaimanakah proses penetapan mahar untuk pernikahan Bapak ?
 - a. Musyawarah Bapak dan Ibu
 - b. Musyawarah Bapak, Ibu dan anak
 - c. Musyawarah Keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki yang dianggap penting.
8. Apakah proses penetapan mahar bapak berjalan dengan baik (lancar) ?
 - a. Ya/ Lancar
 - b. Di Tunda Beberapa Hari
 - c. Batal
9. Bagaimanakah cara pembayaran mahar untuk pernikahan Bapak ?
 - a. Tunai
 - b. Tidak Tunai
10. Apakah istri Bapak hadir pada saat penetapan mahar untuk pernikahan Bapak?
 - a. Hadir
 - b. Tidak Hadir
 - c. Boleh Hadir Boleh Tidak
11. Berapa lama kah pertangguhan dalam pelunasan mahar istri Bapak ?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun
 - c. Lebih dari 1 tahun
 - d. Tanpa Batas
12. Berapa harikah jarak antara akad nikah dan walimatul 'ursy pada pernikahan Bapak?
 - a. Pada hari akad nikah
 - b. 4 hari setelah akad
 - c. Lebih dari 4 hari
 - d. Tidak ditentukan

13. Berapa lamakah jarak penetapan mahar dengan akad nikah Bapak ?

- a. 1 hari
- b. 2 hari
- c. 3 hari

14. Apa dampak dari prosesi penetapan mahar Bapak ?

- a. Pernikahan di ditunda beberapa hari
- b. Rencana Pernikahan di batalkan
- c. Nikah dengan wali Hakim
- d. Terjadi Perselisihan antara pihak saya dan pihak calon istri.
- e. Kebesatan dari pihak laki-laki.

Selamat Bekerja

* Diisi dengan : Anggota Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara bersama tokoh agama

1. Siapa Nama Lengkap Bapak ?
2. Apakah Bapak Warga Desa Tambusai Barat ?
3. Sudah Berapa Lama Bapak Tinggal di Desa ini ?
4. Apa Kedudukan Bapak Dalam Masyarakat ?
5. Apakah Bapak mengetahui tata cara penetapan mahar di Desa ini ?
6. Bagaimana cara penetapan mahar di Desa ini ?
7. Apakah Bapak melihat ada dampak positif dan negatif dari tradisi penetapan mahar tersebut ?
8. Apakah ada kadar ukuran mahar dalam Syariat Islam ?
9. Apa tujuan penetapan mahar di Desa ini ?
10. Menurut Bapak! apakah tradisi penetapan mahar di Desa ini perlu dipertahankan dan dilestarikan ?

B. Wawancara bersama tokoh adat

1. Siapa Nama Lengkap Bapak ?
2. Apakah Bapak Warga Desa Tambusai Barat ?
3. Sudah Berapa Lama Bapak Tinggal di Desa ini ?
4. Apa Kedudukan Bapak Dalam Masyarakat ?
5. Apakah Bapak mengetahui tata cara penetapan mahar di Desa ini ?
6. Bagaimana cara penetapan mahar di Desa ini ?
7. Berapa besarkah kadar mahar dalam adat Mandailing ?
8. Sejak kapan tradisi penetapan mahar secara adat di lakukan di Desa ini ?
9. Apa saja aturan adat yang harus di junjung tinggi atau di lestarikan di desa ini ?
10. Apakah orang yang tidak mematuhi adat di Desa ini akan di berikan sanksi ?
11. Apa saja saksi adat yang di jatuhkan kepada orang yang melanggar adat ?
12. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak melakukan penetapan mahar secara adat ?
13. Apa tujuannya sehingga penetapan mahar dilakukan sesuai dengan adat Mandailing ?

14. Apakah Bapak melihat ada dampak positif dan negatif dari tradisi penetapan mahar tersebut ?
15. Menurut Bapak! apakah tradisi penetapan mahar di Desa ini perlu dipertahankan dan dilestarikan ?

C. Wawancara bersama Masyarakat

1. Siapa Nama Lengkap Bapak ?
2. Siapa Nama Lengkap Istri Bapak ?
3. Tahun berapa Bapak menikah ?
4. Berapa besar mahar yang dibebankan kepada Bapak ?
5. Bagaimana perasaan Bapak tentang mahar yang ditetapkan dalam prosesi penetapan mahar ?
6. Siapa yang menetapkan mahar istri Bapak ?
7. Bagaimana keadaan penetapan mahar dalam pernikahan Bapak ?
8. Sebelum menikah! Adakah Bapak menanya kepada istri Bapak mengenai maharnya ? Jika ya berapa diminta oleh istri Bapak dan apakah keluarganya setuju ?
9. Bagaimana Akhir rencana pernikahan Bapak ?
10. Bagaimana Respon Keluarga istri terhadap Bapak setelah menikah?
11. Apakah Bapak melihat ada dampak positif dan negatif dari tradisi penetapan mahar tersebut ?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melihat langsung kegiatan pelaksanaan penetapan mahar
2. Melihat langsung kondisi masyarakat Desa Tambusai Barat. Menilai dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan.